

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERKEMBANGAN PKI PEMBERONTAKAN DAN
PERGANTIAN PEMERINTAH RI 1950 - 1966**

SKRIPSI



Oleh :

LIDWINA WIJADMI

NIM : 971314039

NIRM : 973051120604120025

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1998**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERKEMBANGAN PKI PEMBERONTAKAN DAN
PERGANTIAN PEMERINTAH RI 1950 - 1966**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi
Pendidikan Sejarah**

Oleh :

LIDWINA WIJADMI

NIM : 971314039

NIRM : 973051120604120025



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1998**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERKEMBANGAN PKI PEMBERONTAKAN DAN
PERGANTIAN PEMERINTAH RI 1950 - 1966

Oleh :

LIDWINA WIJADMI
NIM : 971314039
NIRM : 973051120604120025

Telah disetujui :

Pembimbing I



Drs. J.B.M. Mudjihardjo

Tanggal 9 November 1998

Pembimbing II



Drs. A.K. Wiharyanto

Tanggal 10 November 1998

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Allah Bapa, atas iman yang dilimpahkan sehingga setelah mengalami berbagai kendala fisik dan mental penyusunan skripsi "PERKEMBANGAN PKI PEMBERONTAKAN DAN PERGANTIAN PEMERINTAH RI 1950 - 1966" dapat terselesaikan. Topik yang diambil sesuai dengan bidang sejarah. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd), pada Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Ada beberapa yang wajib diberikan ucapan terima kasih atas bantuan, dorongan dan gagasan yang luar biasa, selama penyusunan skripsi ini. Mereka itu adalah :

1. Ketua Jurusan PIPS yang telah bersedia mendampingi selama penyusunan Skripsi
2. Ketua Prodi Pendidikan Sejarah dengan penuh kesabaran memberikan dukungan moral selama penelitian, sehingga Skripsi dapat diselesaikan tepat waktu.
3. Bapak Drs. J.B.M. Mudjihardjo, selaku Dosen Pembimbing I. Telah menumbuhkan semangat demi terselesainya skripsi ini dengan mengembangkan ide-ide baru yang sangat positif.
4. Bapak Drs. A.K. Wiharyanto, selaku Dosen Pembimbing II. Di sela-sela tugasnya yang luar biasa, telah menjalankan tugasnya dengan baik, sebagai seorang pembimbing.

Untuk selanjutnya penulis menyadari bahwa kekurangan dari berbagai aspek tentunya lebih mendominasi daripada maksud ideal yang hendak dicapai, sehingga belum memenuhi tuntutan standar minimal penyusunan. Untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang positif demi kemajuan dalam melangkah selanjutnya. Akhirnya sekalipun kecil diharapkan dapat membantu bagi perkembangan ilmu.

Penulis

PERKEMBANGAN PKI PEMBERONTAKAN DAN
PERGANTIAN PEMERINTAH RI 1950 - 1966

SKRIPSI

Oleh :

LIDWINA WIJADMI

NIM : 971314039

NIRM : 973051120604120025

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 18 November 1998
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

SUSUNAN PANITIA PENGUJI :

Ketua : Drs. A.K. Wiharyanto

Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd.

Anggota : 1. Drs. J.B.M. Mudjihardjo

2. Drs. A.K. Wiharyanto

3. Dr. P.J. Suwarno, S.H.

Yogyakarta, tanggal 5 Jan 1999

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

Dekan,



D. Paulus Suparno, S.J., M.S.T.

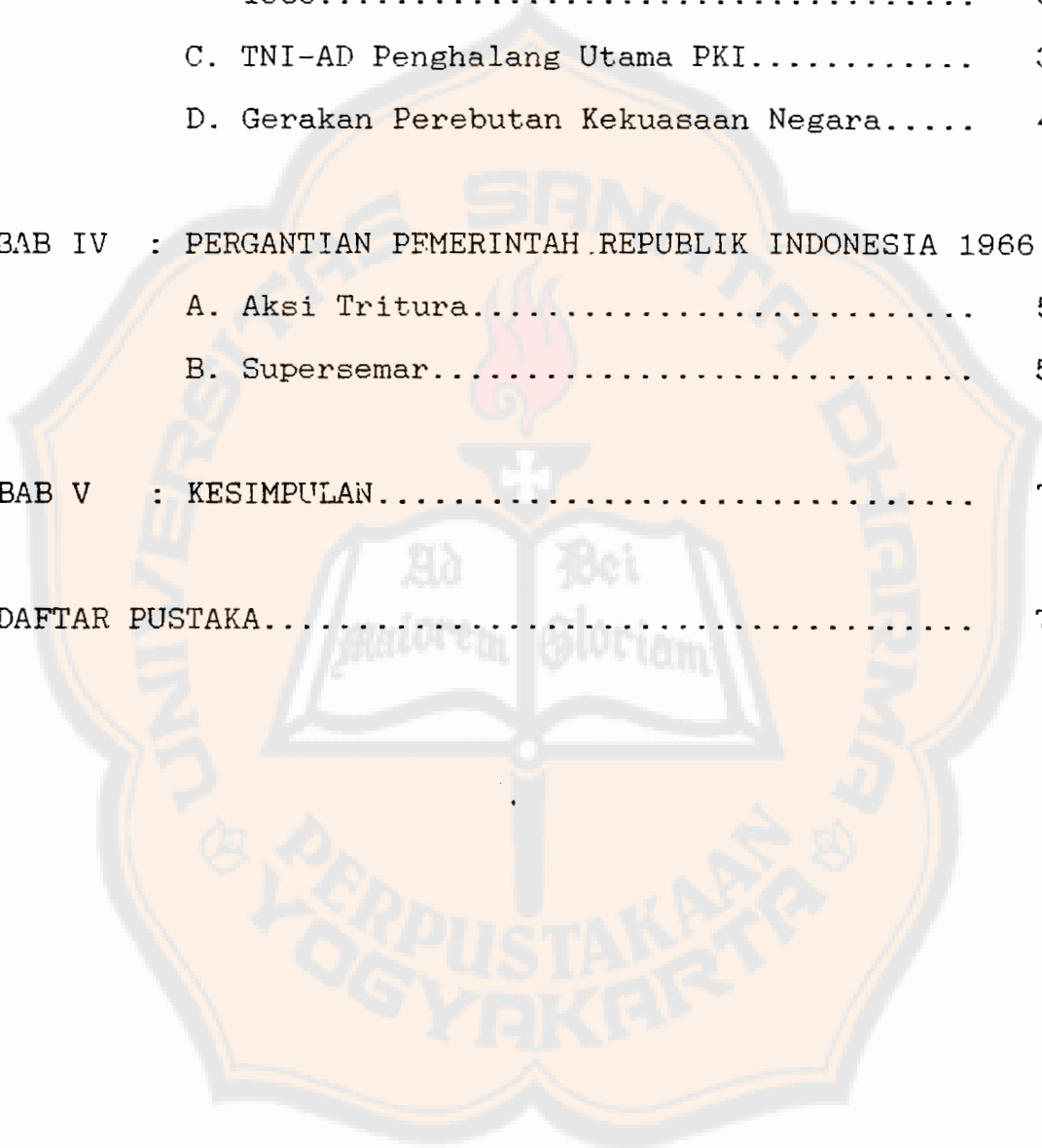
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II : PERKEMBANGAN PKI 1950-1965	
A. Lahirnya PKI pada tahun 1950	14
B. Perkembangan PKI pada tahun 1950-1959 ..	16
C. Perkembangan PKI pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965	21

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III : PEMBERONTAKAN G 30 S / PKI 1965	
A. Peningkatan Situasi Ofensif/Revolusioner	27
B. Kondisi Menjelang Gerakan 30 September 1965.....	33
C. TNI-AD Penghalang Utama PKI.....	35
D. Gerakan Perebutan Kekuasaan Negara.....	42
BAB IV : PERGANTIAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 1966	
A. Aksi Tritura.....	50
B. Supersemar.....	58
BAB V : KESIMPULAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72



ABSTRAK

**PERKEMBANGAN PKI PEMBERONTAKAN DAN
PERGANTIAN PEMERINTAH RI 1950 - 1966**

Penelitian ini bertujuan menjawab tiga permasalahan yaitu sejarah perkembangan PKI 1950-1965, terjadinya pemberontakan G 30 S / PKI 1965 dan terjadinya pergantian pemerintah RI 1966. Untuk menjawab tiga permasalahan tersebut dilakukan studi kepustakaan dengan metode diskriptik analitis. Hasilnya PKI berkembang karena situasi dan kondisi waktu itu memungkinkan. Puncak perkembangan PKI digunakan merebut kekuasaan pada tanggal 30 September 1965. Presiden Soekarno tidak menindak tegas PKI, akibatnya terjadilah peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai pengemban Supersemar.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT THE DEVELOPMENT OF PKI THE REVOLT AND THE REPLACEMENT OF INDONESIAN GOVERNMENT 1950 - 1966

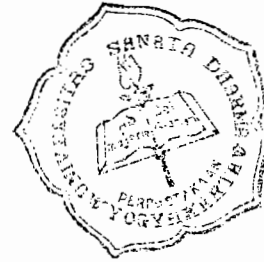
The aim of this research is to answer three problem, ie : the history of PKI development 1950-1965, the revolt of PKI (coup) on 30th September 1965 and the replacement of Indonesian goverment 1966.

To answer these three problems is done by studying of literature with analitical descriptive method. The result is that PKI can develop in that time because of situation and condition is possible.

In the top of PKI development is used to take place the power of the government on 30 September 1965. President Soekarno didn't take measures to PKI and this causes a replacement of a power from President Soekarno to Letjend Soeharto as executor of Supersemar.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi ini orang mendapat kesempatan untuk meluruskan penyampaian fakta sejarah, sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sementara orang berpendapat bahwa sejarah hanyalah urusan para sejarawan dan guru sejarah. Sebagai guru sejarah kadang kebingungan untuk menyampaikan fakta-fakta sejarah yang terjadi, sebab banyak fakta sejarah yang diselewengkan atau dibelokkan, demi kepentingan kekuasaan. Sejarah yang sebenarnya adalah mewariskan informasi-informasi yang benar mengenai masa lalu, tidak hanya demi kepentingan ilmu pengetahuan saja, namun pendidikan sejarah harus berlandaskan pada tujuan yang jelas sebagai dasar membangkitkan semangat nasionalisme anak didik, agar dapat dijadikan landasan membangun watak dan kepribadiannya.

Pengkhianatan PKI dan pergantian pemerintah RI 1966 perlu diteliti kembali guna mendapatkan informasi-informasi sejarah yang benar, yang sekarang bermunculan fakta sejarah baru setelah tiga puluh dua tahun pengkhianatan PKI dan pergantian pemerintah ditulis sesuai fakta-fakta sejarah seperti keinginan penguasa. Dengan fakta-fakta baru yang diungkapkan para pelaku sejarah, diharapkan sangat membantu pengajaran sejarah yang benar sesuai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan peristiwa yang terjadi. Sebab pengajaran sejarah mengandung suatu proses sosialisasi nilai-nilai yang harus diwariskan kepada anak didik. Nilai sejarah masa lampau dapat dijadikan motivasi terhadap diri anak didik sendiri.

Disamping itu apabila masalah tersebut tidak segera dicari jalan pemecahannya, akan sangat berbahaya bagi kepentingan dunia pendidikan, terutama guru sejarah. Untuk mewujudkan nilai-nilai sejarah, maka dalam diri anak didik perlu diberi penyadaran sejarah, sehingga pelajaran sejarah tidak lagi sebagai pelajaran membosankan. Untuk itu pengajaran sejarah tidak hanya menyampaikan fakta-fakta sejarah saja, melainkan juga diadakan karya wisata ke obyek-obyek sejarah antara lain ke peninggalan peninggalan sejarah, museum dan perpustakaan.

Selama ini disadari guru sejarah, dalam menyampaikan pelajaran sejarah banyak peristiwa sejarah yang ahistoris, hal ini disebabkan tidak adanya kesadaran sejarah, sebab kesadaran sejarah, menuntut keberanian mengungkap kisah sejarah yang diselewengkan, demi membangkitkan semangat nasionalisme dalam rangka membangun watak dan kepribadian bangsa.

Mari kita kembali melihat perkembangan PKI yang mampu menjadi salah satu partai terbesar pada masa demokrasi liberal. Pada alam demokrasi liberal, memberi kesempatan kepada PKI untuk mewujudkan cita-citanya mengkomunikasikan masyarakat Indonesia. PKI sebenarnya dimata bangsa Indonesia memiliki citra buruk. Tahun 1926 PKI pernah mengadakan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda dengan memanfaatkan Sarikat Islam. Pemberontakan ini dapat digagalkan, tokoh komunis Muso dan Alimin berhasil melarikan diri ke Moskow.

Sejak pemberontakan PKI 1926-1927 gagal, PKI tidak lagi melakukan aktivitas. Baru tahun 1947 aktivitas PKI muncul kembali. Gerakan PKI menjelang Proklamasi Kemerdekaan dan selama perang kemerdekaan di Indonesia tidak pernah menguntungkan Republik Indonesia, bahkan PKI pada tanggal 18 September 1948 melakukan pemberontakan di Madiun.

Masa demokrasi liberal dimanfaatkan Aidit, kembali pulang ke Indonesia Juli 1950. Aidit mempunyai tujuan menghilangkan citra buruknya dengan mengadakan aliansi ke tubuh partai politik yang penting waktu itu yakni PNI. Dengan bergabungnya PKI dengan PNI diharapkan partai-partai politik tidak curiga lagi dan anti terhadap PKI. Upaya ini berhasil, sejumlah tokoh PNI mulai bekerja sama dengan PKI, kerjasama ini mencapai puncaknya dalam usaha menjatuhkan kabinet Wilopo.

Posisi PKI semakin mantap dalam rangka menyongsong pemilu yang pertama pada tahun 1955. Dalam pemilu ini PKI mampu masuk empat partai besar setelah PNI, Masyumi dan NU. Peluang PKI untuk tumbuh dan berkembang semakin besar, setelah Presiden Soekarno secara terbuka menyatakan keinginannya agar PKI diikutsertakan dalam Kabinet. Gagasan Presiden Soekarno ini tidak terwujud, namun sikap

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Presiden Soekarno telah banyak menolong PKI dalam proses perkembangan politik Indonesia selanjutnya.

Peluang PKI semakin terbuka lebar setelah Drs. Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, karena gerak dan langkah PKI semakin leluasa dalam upaya mendekati Presiden Soekarno.

Suasana politik semakin memburuk serta meluasnya pemberontakan dan tidak stabilnya pemerintahan, walaupun telah diadakan pemilihan umum, kemudian Presiden Soekarno melontarkan gagasan, yang kemudian dikenal dengan "Konsepsi Presiden", namun malah membuat gerakan di daerah semakin meluas.

Dewan Konstituante hasil pemilu, tidak mampu menyusun Undang-Undang Dasar baru, membuat Presiden Soekarno mengambil keputusan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959, terjadilah perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin.

Selanjutnya kondisi pemerintahan sangat menguntungkan PKI, ketika Presiden Soekarno membentuk Front Nasional, dimanfaatkan PKI sebagai alat politik demi mewujudkan cita-cita yang telah gagal. Pada tahun 1960 PKI merasa kuat, yang kemudian diuji coba kepada TNI-AD, dengan melontarkan kritikan bahwa TNI-AD tidak sungguh-sungguh dalam menumpas Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Oleh TNI-AD ditanggapi dengan menghentikan dan pembekuan berbagai kegiatan PKI. Tindakan TNI-AD ini

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mendapat teguran dari Presiden Soekarno.

Secara politik, keberhasilan PKI mendorong mempercepat ambisi politiknya. Tanggal 30 September 1965 PKI mengadakan perebutan kekuasaan. Walaupun nyata-nyata PKI telah mengadakan perebutan kekuasaan, Presiden Soekarno tidak bertindak tegas terhadap PKI. Ketidaktegasan Presiden Soekarno, membawa akibat yang fatal, maka terjadilah pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai PKI, dalam Gerakan 30 September 1965, maka timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah perkembangan PKI 1950 - 1965 ?
2. Bagaimana sejarah terjadinya pemberontakan G 30 S / PKI 1965 ?
3. Bagaimana terjadinya pergantian Pemerintah RI 1965 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan maka penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui sejarah perkembangan PKI 1950 - 1965 ?
2. Untuk mengetahui sejarah terjadinya PKI mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 ?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Untuk mengetahui bagaimana dapat terjadi pergantian pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Letnan Jenderal Soeharto.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dapat menambah informasi tentang sejarah nasional yang Indonesia sentris, khususnya mengenai PKI pada masa demokrasi liberal, dilanjutkan pada masa demokrasi terpimpin.
2. Bagi perkembangan pengetahuan sejarah diharapkan penulisan ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan sejarah tentang perkembangan PKI dalam G 30 S tahun 1965.
3. Bagi para pembaca pada umumnya yang berminat pada sejarah Indonesia, diharapkan dapat memperluas cakrawala sejarah khususnya mengenai pergantian pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto.
4. Bagi penulis sendiri mendapat gambaran nyata adanya keterkaitan teori-teori yang pernah diperoleh di bangku kuliah.

E. Kajian Pustaka

Guna membahas masalah yang dikemukakan maka dipakai beberapa sumber untuk menjawab masalah tersebut. Adapun sumber pokok dalam penulisan ini adalah GERAKAN 30 SEPTEMBER PEMBERONTAKAN PARTAI KOMUBIS INDONESIA, yang dike-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

luarkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia pada tahun 1994, karya Menteri Sekretaris Negara Moerdiono. PAK HARTO PANDANGAN DAN HARAPANNYA, dikeluarkan oleh Pustaka Kartini pada tahun 1987 oleh Abdul Gafur. BIOGRAFI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, dikeluarkan PT. Asri Media Pustaka pada tahun 1996 oleh Jajak MD. JEJAK LANGKAH PAK HARTO dikeluarkan PT. Asri Media Pustaka pada tahun 1990 oleh G. Dwipoyono. SEJARAH NASIONAL INDONESIA V DAN VI, dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1993 oleh Marwati Djonet Poesponegoro. KONSENSUS NASIONAL 1966 - 1969, dikeluarkan P.N. Balai Pustaka pada tahun 1985 oleh Nugroho Notosusanto. DARI SOEKARNO KE SOEHARTO, dikeluarkan PT. Temprint tahun 1993 oleh Marshal Green.

Sebagai Sumber Perbandingan :

BAYANG-BAYANG PKI, dikeluarkan P.T. Intermasa pada tahun 1996 oleh Imran Hasibuan. KEHORMATAN BAGI YANG BERHAK, dikeluarkan Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa tahun 1994 oleh Manai Sophiaan. KESADARAN NASIONAL dikeluarkan Inti Idayu Press tahun 1996, oleh Slamet Mulyono. INDONESIA ABAD ke 20 1 dan 2 dikeluarkan oleh Percetakan Kanisius tahun 1989 oleh Drs. G. Moedjanto.

F. Metode Penelitian

Metode sejarah adalah menguji menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang imajinatif dari masa lampau berdasar data yang diperoleh. Dengan menggunakan metode sejarah untuk merekonstruksi sebanyak-banyaknya dari masa lampau manusia. Metode analisa ini mencakup lima tahapan yaitu :

1. Penelitian Topik.
2. Pengumpulan sumber.
3. Verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber).
4. Intepretasi analisis dan sintesis.
5. Penulisan (Kuntawijoyo, 1995 : 89).

Jadi setelah ditentukan subyek yang akan diteliti atau ditulis maka dikumpulkan sumber-sumber informasi yang telah diuji kebenarannya dan kemudian dipetik unsur-unsur yang dapat dipercaya dari sumber-sumber tersebut untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Langkah-langkah penulisan yang diterapkan dalam metode sejarah mencakup :

- a. Heuristik : penemuan sumber.
- b. Kritik sumber : Ekstern dan Intern.
- c. Analisa sumber : menguraikan informasi dan relasinya satu dengan lainnya.
- d. Sintesis sumber : menyatukan data dan fakta kemudian dikelompokkan menjadi satu.
- e. Intepretasi : menangkap apa yang tersirat dari yang tersurat.
- f. Korobarasi : pengukuan sumber.
- g. Historiografi : penulisan sejarah sehingga menghasilkan kisah atau kajian (Kuntowijoyo, 1995 : 102).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data-data masa lalu atau peninggalan baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung masa lalu terlepas dari masa keadaan sekarang dalam hubungan dengan kejadian atau keadaan masa lalu. Metode historis dapat dilakukan dengan dua cara :

1. Untuk menggambarkan gejala-gejala yang terjadi pada masa lalu sebagai suatu rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, terbatas pada kurun waktu tertentu pada masa lampau.
2. Menggambarkan gejala-gejala masa lalu sebagai suatu sebab suatu keadaan atau kejadian pada masa lalu digunakan sebagai informasi untuk memperjelas kejadian atau keadaan masa sekarang sebagai rangkaian yang tidak terputus atau saling berhubungan satu sama lain.

Metode historis lebih memusatkan pada masa lampau berupa peninggalan, dokumen arsip benda-benda bersejarah dan lain-lain (Hadari Nawawi, 1987 : 79).

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik di perpustakaan maupun di tempat lain. Literatur tidak hanya terbatas dari buku-buku tetapi juga berupa bahan dokumentasi, surat kabar, catatan kuliah, dan lain-lain. Dari literatur dapat ditentukan berbagai prinsip teori maupun hukum-hukum, juga pendapat yang dapat digunakan sebagai bahan untuk memecah-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kan masalah/penelitian kepustakaan.

Setelah data-data terkumpul kita gunakan metode deskriptik analisisitis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasar fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Untuk mengemukakan gejala-gejala secara lengkap pada tahap awal tertuju pada usaha menyelidiki agar lebih jelas keadaan atau kondisinya. Tahap ini fakta-fakta yang ada ditentukan bersifat seadanya.

Fakta yang ditentukan diberi penafsiran dengan analisa dan intepretasi tentang arti data tersebut. ciri-ciri pokok metode ini adalah :

- a. memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
- b. menggambarkan fakta-fakta tentang masalah-masalah yang di sebagaimana adanya dengan intepretasi yang rasional (Hadari Nawawi, 1987 : 80).

Dengan uraian diatas, maka sebagai langkah-langkah penulisan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan sumber-sumber informasi yang telah diuji kebenarannya dan mengambil bagian-bagian yang dapat dipercaya untuk dapat menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Sumber-sumber yang merupakan data masalah yang dipakai untuk informasi guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan. Sumber ini merupakan kumpulan dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur yang ada di perpustakaan berupa surat kabar dan bahan-bahan dokumen lain serta bahan tertulis dari catatan. Sumber tersebut telah diuji kebenarannya melalui kritik sumber kemudian dianalisis serta dibuat intepretasinya.
3. Setelah data-data terkumpul data-data tersebut disajikan dalam bentuk penulisan/historiografi yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian yang berdasarkan fakta yang terkumpul.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini secara garis besar dibagi dalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang permasalahan yang merupakan sub bab pertama sebagai alasan yang melandasi perlunya pemecahan masalah. Batasan masalah merupakan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sub bab kedua yang berisi batasan yang tegas mengenai hal-hal yang terjadi dalam pembahasan untuk menghindari penyimpangan dan agar pembicaraan terpusat hanya pada pokok permasalahan. Perumusan masalah adalah sub bab ketiga yang berisi masalah-masalah umum akan terjawab jika masalah khusus telah terjawab. Tujuan penelitian merupakan sub bab keempat mengenai perumusan masalah. Manfaat penelitian merupakan sub bab kelima yang berisi harapan atas terselesainya penelitian. Kajian pustaka merupakan sub bab keenam yang berisi mengenai sumber-sumber pokok yang digunakan sebagai dasar penulisan serta ditunjang beberapa literatur lainnya. Metodologi penelitian merupakan sub bab yang ketujuh yang menjelaskan mengenai jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Sub bab yang kedelapan mengenai sistematika penulisan.

BAB II PERKEMBANGAN PKI 1950 - 1965

Penjelasan dalam bab ini akan dibagi dalam tiga sub bab, sub bab pertama mengenai lahirnya PKI pada tanggal 4 Februari 1950, sub bab yang kedua mengenai perkembangan PKI tahun 1950 - 1959 dan sub bab yang ketiga membicarakan PKI pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 - 1965.

BAB III PEMBERONTAKAN G 30 S / PKI 1965

Dalam bab ini akan dibagi menjadi empat sub bab yang masing-masing menjelaskan bagaimana PKI mengadakan pemberontakan. Penjelasan dalam bab ini dibuat secara siste-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

matis agar tetap berkesinambungan dengan bab-bab sebelumnya. Sub bab yang pertama membahas mengenai apa yang mereka sebut "Peningkatan Situasi Ofensif Revolusioner". Sub bab kedua membicarakan kondisi menjelang Gerakan 30 September 1965. Sub bab yang ketiga membicarakan TNI-AD sebagai penghalang utama PKI dan sub bab keempat membicarakan Gerakan Perebutan Kekuasaan 30 September 1965.

BAB IV PERGANTIAN KEPEMIMPINAN DARI PRESIDEN SOEKARNO KE LETJAN JENDERAL SOEHARTO 1966.

Uraian dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas bagaimana aksi-aksi TRITURA terjadi dan sub bab yang kedua membahas mengenai bagaimana lahirnya Supersemar dan pergantian pemerintah dari Presiden Soekarno ke Letjen Soeharto.

BAB V KESIMPULAN

Dalam kesimpulan ini akan diungkapkan berbagai jawaban permasalahan yang ada. Dalam skripsi ini ada tiga permasalahan maka dalam kesimpulan dituliskan tiga jawaban permasalahan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembahasan masalah maka akan disajikan pada bab-bab berikut ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II

PERKEMBANGAN PKI 1950 - 1965

A. Lahirnya Kembali PKI

Masa demokrasi liberal dimanfaatkan tokoh-tokoh PKI seperti Alimin dan Aidit kembali ke Indonesia. Kedua tokoh PKI tersebut melarikan diri ke Moskow setelah gagal melakukan pemberontakan Madiun pada tanggal 18 September 1948. Kembalinya tokoh-tokoh PKI tersebut bertujuan menghidupkan kembali PKI. Pada tanggal 4 Februari 1950 PKI diaktifkan. Kembalinya dua tokoh PKI ke Indonesia mendapat bantuan dari tokoh Syam Kamarusaman yang saat itu sebagai salah seorang pimpinan buruh di pelabuhan Tanjung Priok.

Usaha Aidit yang pertama adalah menghimpun kembali kekuatan seluruh golongan kiri antara lain Sentral Organisasi Buruh Indonesia (SOBSI), Serikat Buruh Kereta Api (SBKA), Barisan Tani Indonesia (BTI). Tindakan Aidit disusul dengan mengintensifkan propaganda untuk memperbaiki citra buruk PKI dalam pemberontakan Madiun 18 September 1948. Inti propaganda adalah menangkis tuduhan sebagai dalang pemberontakan Madiun.

Kepemimpinan Aidit semakin kokoh setelah tokoh muda seperti Nyoto, Sudisman ikut bergabung. Untuk membangun dan mengembangkan PKI, Aidit mengirim Syam Kamarusaman pimpinan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) ke RRC untuk mempelajari soal-soal kemiliteran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Manai Sophiaan, 1994 : 73).

Aidit kemudian membentuk Komite Central Partai Komunis Indonesia (CCPKI) yang terdiri dari Aidit, Lukman, Nyoto, Sudisman dan Alimin. Pimpinan baru inilah yang membangun dan mengembangkan PKI dengan Strategi front Persatuan Nasional. Aidit kemudian kembali menggerakkan kerusuhan di Jakarta, pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman tahun 1951. Kabinet Sukiman kemudian melakukan penangkapan terhadap pimpinan PKI. Dalam operasi penangkapan ini Aidit berhasil melarikan diri ke Moskow, sedangkan PKI mengadakan gerakan bawah tanah.

Pada tahun 1953 Aidit kembali ke Indonesia menegaskan cara-cara perjuangan PKI menggunakan jalan yang revolusioner di samping cara-cara parlementer. Aidit juga menyusun program partai guna mencapai tujuannya, program tersebut adalah :

- a. Membina front persatuan nasional yang berdasarkan persatuan kaum buruh dan kaum tani.
- b. Membangun PKI yang meluas di seluruh negara yang mempunyai ciri khas massa yang luas yang terkonsolidasi di lapangan ideologi, politik dan organisasi (Moerdiono, 1994 : 25).

Dalam membina front persatuan nasional, PKI memanfaatkan buruh dan tani, untuk mewujudkan konsep Demokrasi Rakyat. PKI menggunakan propaganda yang sangat menarik, bahwa petani harus merdeka, memiliki tanah dan menerima upah sesuai dengan yang dikehendaki. Front Persatuan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

digarap oleh petani. Petani memprotes tetapi disambut polisi dengan tembakan-tembakan yang menyebabkan beberapa petani tewas (Moedjanto, 1989 : 89).

Golongan yang anti Kabinet, tokoh-tokoh penganjur persatuan dari PNI mencela tindakan pemerintah, peristiwa ini digunakan PKI bersama PNI untuk menjatuhkan Kabinet Wilopo. Namun peristiwa yang cukup menggoncangkan Kabinet Wilopo adalah peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu peristiwa yang menyangkut reorganisasi atau profesionalisasi tentara. Maksud reorganisasi adalah untuk mengadakan penghematan tetapi juga membentuk tentara yang memenuhi persyaratan internasional. Hal ini mendapat protes keras dari kalangan perwira berpendidikan rendah.

PNI dan PKI berhasil menjatuhkan Kabinet Wilopo, segera PKI mendesak untuk membentuk Kabinet Baru yang di dalamnya termasuk PKI namun tanpa Masyumi. Kabinet baru ini dikenal dengan nama Kabinet Ali Sastroamijoyo I, berdasarkan Kepres No. 132 tanggal 30 Juli 1953. PKI dalam mendekati pemerintah dimanfaatkan dengan baik, demikian juga berbagai keadaan dan kondisi sosial. Selama kabinet Ali I PKI memberi dukungan penuh. Setiap Kabinet Ali I mendapat rongrongan dari kelompok lain, PKI membela dengan keras kelompok yang hendak menjatuhkannya.

Posisi PKI semakin mantap berkat usaha Aidit mengadakan propaganda yang mampu menarik perhatian massa. Pada tanggal 29 September 1955 pada pemilu yang pertama PKI mampu menempatkan posisinya masuk dalam empat partai besar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

setelah PNI, Masyumi dan NU. Meskipun PKI mendapat suara, yang cukup besar dalam pemilihan umum, namun PKI tidak berhasil duduk dalam kabinet yang terbentuk setelah pemilu (Abdul Gafur, 1987:222).

Presiden Soekarno sendiri kemudian menyatakan secara terbuka agar PKI diikuti sertakan dalam kabinet. Pendapat Presiden Soekarno ini berdasarkan perolehan suara PKI yang didapatkan dalam pemilihan umum yang pertama 29 September 1955. Keinginan ini tidak terwujud, karena kabinet yang terbentuk adalah kabinet koalisi antara PNI, Masyumi dan NU. Kabinet setelah pemilihan umum ini dinamakan kabinet Ali II. Meskipun gagal sikap Presiden Soekarno telah banyak membantu PKI dalam proses perkembangan politik Indonesia.

Pengumuman resmi terbentuknya kabinet lengkap diumumkan tanggal 20 Maret 1956. Kabinet Ali II mendapat tantangan dari PSI dan PKI karena kedua partai tersebut tidak diikutsertakan dalam kabinet namun tantangan ini tidak begitu besar, sebab banyak anggotanya yang diajak ikut serta dalam Kabinet.

Pada tanggal 1 Desember 1956, Drs Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil Presiden. Berpisahnya dwi-tunggal Soekarno - Hatta sangat menguntungkan bagi perkembangan PKI, sebab PKI dapat dengan leluasa mendekati Presiden Soekarno. Tanda-tanda mulai putusya kerja sama Soekarno - Hatta sudah diumumkan sejak Indonesia menganut sistem Parlementer yang menjadikan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Presiden dan wakil Presiden semata-mata hanya sebagai simbol saja.

Kemenangan yang dicapai PKI dalam pemilihan umum tanggal 29 September 1955 sebagai hasil agitasi dan propaganda D.N Aidit yang luar biasa. Jika diingat keperistiwa tujuh tahun sebelumnya, PKI mengkhianati perjuangan bangsa. Dengan kemenangan yang diraihny PKI berkobar lagi semangatnya dalam mewujudkan impiannya yang gagal mereka capai pada tahun 1948. PKI akan mendirikan sebuah negara dan masyarakat yang komunis yang tidak dikenal bangsa Indonesia sebelumnya. Untuk mencapai tujuan politiknya PKI pertama harus menanamkan pengaruh diberbagai bidang kehidupan kenegaraan baik dibidang ideologi, politik, maupun dibidang militer. Disamping itu PKI juga pandai mengeksploitor (memanfaatkan) ketenaran dan kewibawaan Presiden Soekarno. Slogan atau pernyataan Presiden Soekarno diambil alih seolah-olah itu slogan atau pernyataan PKI, sehingga rakyat banyak yang mengidentifikasikan PKI dengan Soekarno lebih dari pada mengidentifikasikan PNI.

Dibidang ideologi PKI berusaha mengadakan perubahan terhadap Pancasila yaitu sila pertama dengan "Kemerdekaan Beragama". Menurut PKI tidak semua orang beragama monotheis banyak orang beragama polytheis bahkan ada yang tidak beragama sama sekali.

Dikalangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dimana ABRI merupakan musuh utama PKI, PKI menggunakan strategi politik yang mereka sebut Metode Kombinasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP). Metode revolusi ini mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perjuangan gerilya di desa yang terdiri dari kaum buruh tani dan tani miskin.
- b. Perjuangan revolusioner kaum buruh di kota-kota, terutama kaum buruh angkutan.
- c. Bekerja secara intensif di kalangan musuh, terutama di kalangan Angkatan Bersenjata (Moerdiono. 1984 : 37).

Dalam suasana politik yang makin memburuk dan meluasnya pemberontakan didaerah dan tidak tercapainya pemerintahan yang stabil setelah dilakukan pemilihan umum, Presiden Soekarno melontarkan gagasan untuk memperbaiki keadaan. Gagasan tersebut dikenal sebagai "Konsep Presiden".

Isi pokoknya:

1. Sistem Demokrasi Parlementer tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, karena itu diganti dengan sistem Demokrasi Terpimpin.
2. Dalam Sistem Demokrasi Terpimpin perlu dibentuk kabinet gotong royong yang anggotanya terdiri empat partai besar yakni PNI, Masyumi, NU dan PKI.
3. Pembentukan Dewan Nasional, yang tugasnya memberi nasehat baik diminta maupun tidak (Nugroho Noto-susanto, 1988 : 107).

Bagi PKI, keinginan Presiden Soekarno sangat menguntungkan, karena itu PKI segera menyatakan dukungannya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terutama mengenai pembentukan Kabinet Gotong Royong dan pelaksanaan demokrasi terpimpin, sebab PKI mempunyai harapan terwujudnya Front Persatuan Nasional yaitu bersatunya organisasi yang bersimpati dan mendukung PKI. Semua partai yang ada menolak konsepsi Presiden kecuali PKI, sebab mengubah sistem pemerintahan adalah menjadi tanggung jawab dan wewenang Konstituante. Hal ini mengakibatkan gerakan di daerah semakin memuncak karena Kabinet Ali Sastroamijoyo II tak berhasil mengatasi keadaan, bulan Maret 1957 mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

C. Perkembangan PKI Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965

Setelah Konstituante gagal menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Presiden Soekarno menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan suatu dekrit pada tanggal 5 Juli 1959. Penjelasan mengenai dekrit disampaikan dalam pidato pada tanggal 17 Agustus 1959. Pidato ini kemudian diberi sebutan "Manifesto Politik Republik Indonesia" (Manipol).

Presiden selanjutnya meminta kepada Panitia Kerja Dewan Pertimbangan Agung (DPA) agar isi pidato dirumuskan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal ini dimanfaatkan PKI untuk memasukkan program PKI ke dalam GBHN, sebab yang memimpin Panitia Kerja Dewan Pertimbangan Agung ialah Aidit. Intisari Manipol, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia (USDEK). Dalam GBHN ini kepentingan PKI, tertampung karena sudah dijadikan kepentingan nasional.

PKI semakin mendapat angin ketika Presiden Soekarno membentuk Front Nasional, yang kemudian dijadikan alat politik PKI, untuk menghimpun organisasi massa yang menjadi anak organisasi PKI dengan Strategi "Front Persatuan"nya guna mencapai tujuan.

Perkembangan selanjutnya yang menguntungkan PKI terjadi tahun 1960 dimana Presiden Soekarno mulai mengadakan pembaharuan struktur pemerintahan menurut ketentuan Manipol. Sesuai dengan program umum Manipol maka dibentuklah badan-badan baru seperti MPRS, DPA dan Front Nasional. Front Nasional sebagai alat penggerak masyarakat secara demokratis namun kenyataannya tidak sesuai, karena badan ini telah dipengaruhi oleh orang-orang PKI. Program lain dari Manipol, mengadakan perombakan aparatur di semua lembaga pemerintahan, termasuk alat kekuasaan negara (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian). Dalam pelaksanaan rituling, maka konsepsi gotong royong telah mencakup semua kelompok Nasionalis, Agama dan Kelompok Komunis (Nasakom) seperti yang dikehendaki PKI.

Selanjutnya Presiden berjanji akan membentuk Kabinet Gotong-Royong yang memasukkan PKI. Secara politik PKI mendapat perlindungan, PKI mencoba kekuatannya dengan menuduh TNI-AD tidak bersungguh-sungguh dalam menumpas pemberontakan PRRI/Permesta. Mendapat kritikan ini TNI-AD membalas

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan cara membekukan berbagai kegiatan PKI sesuai dengan Undang-Undang Bahaya yang waktu itu berlaku dengan melarang media massa PKI terbit dan beredar (Nugroho Notosusanto, 1985 : 5). Namun apa yang dilakukan TNI-AD, diperingatkan oleh Presiden agar tidak menyalahgunakan Undang - Undang Keadaan Bahaya. Peringatan ini dipertegas dalam pidato 17 Agustus 1960 yang berjudul Jalannya Revolusi Kita (Jarek) yang isinya :

1. Gotong royong yang diartikan mempratekkan tiga kekuatan Islam, Nasional, Komunis (Nasakom).
2. Front nasional bertujuan untuk menggalang persatuan rakyat revolusioner.
3. Tanah untuk tani, artinya diadakan Landreform, mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur (Nugroho Notosusanto, 1985 : 6).

Dalam menyusun program ini PKI diikutsertakan, semakin lama PKI semakin merasa kuat. PKI kemudian mengubah taktik perjuangannya yaitu PKI tidak memandang pekerjaan dalam parlemen sebagai pekerjaan terpokok dan tidak perlu menganggapnya sebagai satu-satunya bentuk perjuangan, PKI mendasarkan politiknya atas analisa Marxis mengenai keadaan yang konkrit dan perimbangan kekuatan. Yaitu lebih ofensif revolusioner terhadap kekuatan sosial politik yang tidak mereka senangi, serta merangkul golongan yang dapat dijadikan kawan seperti Partindo dan PNI melalui Ir. Surachman. Menurut penilaian tiga menteri

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yaitu Nasution, Ipik Gandamana dan Roeslan Abdulgani, PKI sudah sangat membahayakan. Namun Presiden Soekarno menilai bahwa kehadiran PKI masih dapat dikendalikan. Maka berdasarkan keputusan Presiden Nomor 128/1961, PKI diakui sebagai partai yang sah. Agar tidak dicurigai PKI pura-pura menerima UUD 1945 dan Pancasila.

Menurut Nyoto salah satu tokoh PKI, bahwa Pancasila adalah alat pemersatu, bila persatuan telah tercapai maka Pancasila tidak perlu lagi. Dari pendapat ini jelas bahwa PKI menerima Pancasila hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Bila tujuan telah tercapai PKI akan mengkhianati, Pancasila (Moerdiono, 1994:32).

Pada tahun 1964 merupakan tahun dari Ofensif PKI terhadap tokoh-tokoh politik yang dianggap lawan, secara sistematis PKI melancarkan tuduhan kontra-revolusi, anti Pancasila, anti Manipol dan anti terhadap pemimpin besar revolusi. Presidenpun merestui aksi ini sebagai aksi revolusioner. Posisi PKI sendiri semakin kuat setelah dibentuk Kabinet Dwikora 27 Agustus 1964 di dalamnya duduk beberapa orang PKI sebagai Menteri Koordinator (Menko) dan Menteri. Sementara tersiar adanya dokumen CCPKI, yang berisi program rahasia PKI, yaitu revolusi dianggap selesai apabila sudah terwujud demokrasi Rakyat, revolusi perlu disiapkan dengan cara merebut (Moerdiono, 1994:34).

Dokumen rahasia ini jatuh ke tangan partai Murba. Wakil Perdana Menteri III Chairul Saleh, tokoh Murba menyerahkan kepada ketua PNI, Ali Sastroamijoyo. Namun PKI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan berbagai dalih membantah dan mengatakan dokumen itu palsu. partai-partai lain semakin curiga terhadap sifat baik PKI. Tetapi PKI dapat meyakinkan bahwa dokumen itu palsu. Untuk meredakan ketegangan, Presiden memanggil pimpinan partai untuk menyelesaikan persengketaan antar partai, yang menghasilkan Deklarasi Bogor dan dokumen rahasia dianggap selesai tanggal 12 Desember 1964. Atas hasutan PKI, Presiden Soekarno membubarkan Badan Penyelidik Soekarno (BPS). Kelompok anti PKI sangat gigih menentang aksi-aksi PKI, karena itu PKI menganggap BPS sebagai musuhnya. Sasaran berikutnya adalah Partai Murba karena dikaitkan tindakan Chairul Saleh yang membocorkan dokumen rahasia PKI (Moerdiono, 1994 : 35).

Tanda-tanda akan dibubarkannya Partai Murba nampak pada pidato Wakil Perdana Menteri I Dr. Soekardjo dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Harian Demokrasi Masyarakat, bahwa tahun 1965 adalah tahun gawat, tahun kristalisasi dimana akan ada orang-orang yang tadi perjuangan akan rontok karena tidak dapat mengikuti gelombang revolusi.

Pada tanggal 5 Januari 1965 keluarlah keputusan mengenai pembekuan kegiatan Partai Murba, keputusan ini kejadian sekitar akhir tahun 1965 dan awal 1965 menunjukkan gambaran meningkatnya upaya PKI dalam mewujudkan revolusioner melalui serangan-serangan gencar yang ditujukan kepada lawan-lawan politiknya.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pada tanggal 17 Agustus 1965 Bung Karno menamakan tahun 1965 adalah "Tahun Berdiri diatas Kaki Sendiri" disingkat TAKARI. Dalam TAKARI banyak disusupkan ucapan-ucapan yang arogan dan menantang Blok Barat dan sebaliknya ditegaskan rapatnya hubungan dengan RRC dan Blok Komunis.

Pidato-pidato Bung Karno yang menggeledak dan bernada revolusioner itu selalu dipercayakan pada Nyoto salah seorang pimpinan CCPKI. Untuk menyusun TAKARI saja, Nyoto yang sedang berkunjung ke RRC terpaksa dipanggil pulang oleh Bung Karno (Abdul Gafur, 1989 : 241).

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1965 ketegangan politik semakin meningkat. Hubungan Presiden Soekarno dan AD semakin tegang karena perbedaan sikap terhadap PKI. PKI sendiri terus menerus menempel kepada Presiden Soekarno sebagai tempat berlindung dan anti pada Angkatan Darat. Pada tahun 1965 eksistensi PKI sangat menghawatirkan sebab hampir semua kekuatan sosial politik memusuhinya, terlebih Angkatan Darat, hal ini disebabkan PKI akan merebut kekuasaan pada tahun 1970, yang tertulis dalam dokumen rahasia PKI yang ditemukan Partai Murba.

Kekhawatiran PKI semakin meningkat setelah Presiden Soekarno terganggu kesehatannya, dimana PKI khawatir sewaktu-waktu Presiden Soekarno bisa meninggal. Jika hal ini sampai terjadi maka nasib PKI diujung tanduk. Pasti Angkatan Darat menghajarnya. maka dari itu untuk tidak didahului oleh Angkatan Darat, PKI menggerakkan pemberontakan yang terkenal dengan Gerakan 30 September (Gestapu).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Namun malang bagi PKI, Gestapu dapat ditumpas oleh kekuatan sosial politik dan Militer yang anti PKI.

Kegagalan Gestapu ternyata tidak hanya menyebabkan kehancuran PKI tetapi juga keruntuhan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya. Untuk mengetahui lebih lanjut akan gerak dan langkah PKI dalam usaha perebutan kekuasaan akan dibahas dalam bab berikutnya.



BAB III

PEMBEROTAKAN G 30 S / PKI 1965

A. Peningkatan Situasi Ofensif/Revolusioner

Aksi-aksi revolusioner PKI melalui serangan-serangan gencar yang ditujukan kepada lawan-lawan politiknya. Melalui sidang Politbiro CCPKI pada tahun 1954, PKI telah merumuskan metode revolusi yang dianggap cocok untuk kondisi Indonesia, yaitu "Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan". Metode ini mencakup :

- perjuangan gerilya didesa yang terdiri dari kaum buruh tani dan tani miskin.
- Perjuangan revolusioner kaum buruh dikota-kota terutama kaum buruh angkutan.
- Bekerja secara intensif dikalangan musuh, terutama dikalangan Angkatan Bersenjata (Moerdiono, 1994 : 37).

Dengan metode ini tindakan PKI semakin radikal dan tidak mengenal kompromi. Untuk mewujudkan cita-citanya yang dilakukan PKI adalah :

1. Sabotase dan aksi teror.

Upaya PKI untuk menetapkan suasana revolusioner selain melakukan kegiatan politik yang meningkat juga melalui sabotase-sabotase dan aksi teror.

- a. Tindakan sabotase terhadap Transportasi umum kereta api oleh Serikat Buruh kereta api.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tindakan ini dilakukan oleh PKI guna menghancurkan sarana-sarana vital yang dimiliki oleh pemerintah. Pada tanggal 11 Januari 1964 rangkaian kereta api rute selatan yang melanggar sinyal sehingga menabrak rangkaian gerbong yang ada di situ. Hal ini terus berlanjut tanggal 6 Februari 1964. Kasus tabrakan kereta api juga terjadi di Solo Jawa Tengah. Tanggal 30 April 1964 terjadi di Kroya. Kasus lepas dan larinya gerbong dari lokomotifnya tanggal 18 Oktober 1964 di daerah Tasikmalaya. Teror-teror seperti ini dilakukan oleh PKI untuk membuat suasana takut yang mencekam, sehingga masyarakat luas tidak percaya kepada pemerintah, sebab tidak mampu menciptakan suasana aman. (Moerdiono, 1994:50).

Hasil penyelidikan oleh aparat yang berwenang menunjukkan bahwa kasus kecelakaan seperti itu merupakan kesengajaan (sabotase) yang berten-densi politik. Para pelakunya adalah Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) yang merupakan organisasi di bawah Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indone-sia (SOBSI). SOBSI diperalat PKI karena merupakan partai yang tertua dan sudah berpengalaman (Nugroho Notosusanto, 1993 : 366).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b. Aksi-aksi sepihak dari Barisan Tani Indonesia (BTI)

Pada ulang tahun PKI yang ke 44 ketua CCPKI D.N. Aidit mengadakan gerakan "turun ke bawah" untuk melakukan penelitian. Tujuannya untuk membuktikan bahwa petani Jawa begitu miskin, sehingga dapat dijadikan alat penggerak untuk mendukung program-program PKI melawan para tuan tanah.

Untuk mempengaruhi petani PKI menggunakan dalih membantu mereka yaitu kampanye mengenai Undang-Undang No. 2/1960 yaitu Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil dan Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang No. 5/1960. Untuk meningkatkan pertentangan kelas sesuai dengan Doktrin Marxisme-Leninnisme. Dalam kampanyenya PKI mempropagandakan anti "Tujuh Setan Desa" yaitu tuan tanah, lintah darat, tengkulak, tukang ijon, kapitalis birokrat, bandit desa dan pengumpul Zakat. Ketujuh setan desa ini adalah musuh petani (Nugroho Notosusanto, 1993 : 367).

Dengan taktik ini seolah-olah PKI membela kaum tani. Dalam hal ini petani tidak mengetahui, sebab setelah Komunis berkuasa justru menindas kaum tani seperti yang terjadi di Uni Sovyet. Aksi menggoyang setan desa menimbulkan rasa dendam di kalangan masyarakat desa. Dalam usaha menarik hati massa PKI menggunakan cara sebagai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berikut :

1) Aksi Massa BTI di Jawa Tengah

Atas hasutan PKI anggota BTI melakukan pengeroyokan kepada seorang petani bernama Partosukarjo. Di kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten BTI juga membabat habis padi milik rakyat.

2) Aksi Massa BTI di Jawa Barat.

Pada tanggal 15 dan 16 Oktober 1964 terjadi pengeroyokan terhadap anggota polisi kehutanan yang menjaga perkebunan milik negara oleh anggota BTI didaerah hutan Karticala dan Tugu di Kabupaten Indramayu (Moerdiono, 1994 : 51).

3) Aksi Massa BTI di Jawa Timur.

Pada tanggal 15 Januari 1965 terjadi gerakan massa yang dilakukan BTI dengan menganiaya seorang petani yang sedang menggarap sawah tanpa alasan yang jelas ini terjadi di Kediri.

C. Aksi-aksi Teror

1) Peristiwa Kanigoro Kediri.

Anggota massa PKI dipimpin oleh Pemuda Rakyat (PR) mengadakan penyerbuan terhadap aktivitas Pelajar Islam Indonesia (PII) yang sedang latihan mental. Dalam kesempatan ini PKI/PR mengadakan pemukulan terhadap para kiai, imam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

masjid serta merusak rumah ibadat dan menginjak-injak Al-Qur'an, sambil meneriakkan "Ganyang Masyumi" dan lain-lain.

2) Perusakan Kantor Gubernur Jawa Timur.

Tanggal 27 September 1965 dikantor Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur, Gabungan Organisasi Wanita Surabaya (GOWS) mendesak pemerintah agar Pemerintah Daerah menerima delegasi yang menyampaikan resolusi penurunan harga. Namun tiba-tiba datang massa PKI yang terdiri dari Pemuda Rakyat (PR) dan Gerakan Wanita (Gerwani) menghancurkan kantor Gubernur secara tidak terkendali. Tujuannya adalah menangkap Gubernur Brigjen TNI Wiyono yang kemudian membunuhnya.

3) Aksi Massa dan Demonstrasi anti Amerika

Dalam meningkatkan aksi revolusioner PKI memanfaatkan situasi anti Neokolonialisme - Imperialisme (Nekolim) dengan Amerika sebagai sasarannya. Desember 1964 PKI mengadakan demonstrasi di kantor penerangan Amerika Serikat. Dalam aksinya PKI menghancurkan kantor perpustakaan USIS (United States Information Service) yang berada di Jakarta dan Surabaya.

2. Ofensif Guna Menguasai Partai Politik dan Organisasi Massa

a. PKI menginfiltrasi PNI mulai berhasil terbukti

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan kenyataan bahwa sejak tahun 1959 PNI mengubah pengertian Marhaenisme menjadi "Marxisme yang diterapkan dalam kondisi Indonesia". Kemudian PNI menempuh garis kiri anti Amerika yang barang tentu disokong penuh semangat PKI. Perubahan pengertian Marhaenisme akan diselewengkan oleh PKI. Orang PNI yang berusaha agar supaya garis politik PNI tidak mengikuti garis politik PKI disingkirkan. Bahkan oleh Presiden Soekarno dicap sebagai "Marhaenisme Gadungan" (Nugroho Notcsusanto, 1993 : 369).

- b. Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), organisasi khusus PNI yang menyatakan tidak ada perbedaan khusus antara LKN dan Lekra sebab landasan LKN dan Lekra sama-sama bertumpu pada Marxisme.

3. Infiltrasi Dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

PGRI menjadi incaran PKI untuk diinfiltrasi dan dipengaruhi dari dalam. Usaha PKI untuk menguasai PGRI dari dalam tidak berhasil maka PKI mengadakan PGRI tandingan di bawah Subandri dan mendapat dukungan dari Menteri P dan K, Prof. Dr. Priyono PGRI tandingan atau PGRI Non Vak Sentral kurang mendapat dukungan dibanding PGRI asli. Tetapi di Pulau Jawa mendapat dukungan dari kalangan guru-guru sekolah dasar. Banyak guru sekolah dasar yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terlibat secara organisatoris dengan organisasi massa PKI.

4. Partindo (Partai Indonesia)

Dipimpin Asmara Hadi yang juga anggota PKI. Maka Partindo yang tadinya nasionalis menjadi mantel PKI. Sehingga seluruh nafas dan suara maupun kegiatan Partindo benar-benar menyuarakan dan melaksanakan program PKI (Nugroho Notosusanto, 1993 : 370).

B. Kondisi Menjelang Gerakan 30 September 1965

Semenjak ditetapkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Presiden mengeluarkan beberapa kebijakan politik antara lain :

1. Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul dan yang terkenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia yang pada tanggal 19 November 1960, Manifesto tersebut dijadikan "Garis Besar Haluan Negara".
2. Amanat Presiden 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama "Jalan Revolusi Kita" yang dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tanggal 9 November 1960 dijadikan "Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia".
3. Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 di muka sidang Umum PBB yang berjudul "To Built the World

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

a new" (Membangun Dunia Kembali) yang dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, tanggal 19 November 1960 ditetapkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia yang oleh DPA tanggal 19 Januari 1961 dinyatakan sebagai "garis-garis Besar Politik Luar Negeri RI" (Nugroho Notosusanto, 1994 : 341).

Di bidang politik luar negeri Manipol menyatakan sebagai tujuan jangka pendek, melanjutkan perjuangan anti imperialisme. Dalam jangka panjang Revolusi Indonesia bertujuan melenyapkan imperialisme dimana-mana dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang kekal dan abadi. Diplomasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah secara damai.

Namun Manipol tidak lain menggunakan cara-cara yang tidak mengenal kompromi yaitu dengan cara revolusioner dan harus radikal. Dengan Manipol Indonesia menghimpun kawan-kawan yang hendak mengadakan konfrontasi terhadap musuh revolusi, pelaksanaan Manipol sangat menguntungkan PKI, sehingga PKI semakin bergairah dalam "ofensif revolusioner" dan menyebarkan pandangan bahwa anti-Nasakom berarti juga anti Pancasila. Dengan Manipol akhirnya menggiring Indonesia masuk perangkap konfrontasi militer dengan Malaysia. Setelah Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia memberikan reaksi yang sangat keras dan langsung menyatakan keluar dari keanggo-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

taan PBB. Untuk menghadapi Malaysia dan sekutunya Bung Karno menyerukan untuk mengadakan mobilisasi kekuatan rakyat, yang sangat jelas yaitu "Ganyang Malaysia". Upaya PKI mewujudkan kekuatan di luar ABRI diuntungkan dengan situasi konfrontasi Indonesia-Malaysia. Situasi ini dimanfaatkan PKI untuk meningkatkan situasi revolusioner dengan memperhebat agitasi propaganda anti-Nekolim. Secara fisik militer, pembentukan sukarelawan-sukarelawati Dwikora, telah memberi peluang kepada PKI untuk juga membentuk sukarelawan-sukarelawati dari kalangan Pemuda Rakyat, Gerwani dan unsur-unsur buruh yang tersebar di dalam satuan-satuan sukwan-sukwati (Moerdiono, 1994:47).

Gagasan PKI untuk mempunyai kekuatan bersenjata yang dapat dikendalikan sendiri, memperoleh wujud nyata dalam konsep "Angkatan V" yang disampaikan oleh Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Chou En Lai kepada Presiden Soekarno. Konsep ini dimanfaatkan D.N. Aidit dengan menuntut Presiden Soekarno segera mempersenjatai buruh dan tani (Moerdiono, 1994 : 47).

Namun seruan Bung Karno mengadakan mobilisasi kekuatan rakyat dalam Dwikora jelas untuk apa, yang dirumuskan secara populer "Ganyang Malaysia" sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembentukan "Angkatan V" sebab untuk membentuk Angkatan V yang begitu prinsipil, tidak mungkin dilakukan tanpa disetujui oleh ketiga lembaga tinggi negara, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif maupun dimintakan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Agung.

Gagasan Angkatan V sebenarnya hanya move politik yang dilontarkan oleh Bung Karno, yang ide pokoknya bertolak dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 tentang bela negara yang diakitkan dengan gerakan "ganyang Malaysia". Hanya pihak pers tertentu yang membesar-besarkannya dan meminta reaksi dari Menteri/Panglima Angkatan Darat yang tentu saja menentanginya. Dengan demikian, move politik ini segera diekspos seolah-olah Bung Karno sudah memerintahkan pembentukan Angkatan ke V, yang kemudian dituding sebagai salah satu keterlibatan Bung Karno dalam G 30 S/PKI (Manai Sophiaan, 1994 : 38).

C. TNI-AD Penghalang Utama PKI

Kaum Komunis selalu berusaha menguasai Angkatan Perang sebab dengan cara demikian PKI akan dapat merebut kekuasaan negara di Indonesia. Usaha untuk menguasai Angkatan Perang sudah mulai dilakukan PKI dalam masa Perang Kemerdekaan pada waktu Amir Syarifudin sebagai Menteri Pertahanan. Amir Syarifudin menyusun sebuah konsep untuk membentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) menurut model tentara merah di Rusia tanpa mempertimbangkan watak dan ciri TNI yang ada di Indonesia.

Konsep Amir Syarifudin itu ditolak oleh Panglima Besar Jendral Sudirman. Jendral Sudirman malah meneruskan suatu konsepsi yang menegaskan bahwa TNI adalah tentara rakyat dan tentara revolusi. Namun Amir Syarifudin tetap

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

meneruskan niatnya apalagi sebagai Menteri Pertahanan ia mempunyai kekuasaan yang besar. Maka Amir membentuk sebuah badan yang disebut Pendidikan Politik Tentara (Pepolit) yang anggotanya disebut opsir Politik, sejenis komisaris politik di negara-negara komunis (Nugroho Notosusanto, 1993 : 118).

Akibat situasi itu dalam bidang pertahanan terjadi dualisme bidang pertahanan nasional. Tentara reguler di bawah pimpinan Jendral Sudirman, laskar-laskar yang secara de facto di bawah pimpinan tertinggi Menteri Pertahanan melalui Biro Perjuangan. Laskar-laskar mempunyai posisi dan tugas yang sama dengan TRI. Perbedaannya hanyalah TRI adalah milik nasional, sedangkan laskar-laskar adalah milik partai-partai politik.

Keadaan semacam ini disadari betul oleh pimpinan nasional yang kemudian menyatukan kedua kekuatan ke dalam TNI. Namun laskar-laskar yang berbau komunis tidak mau bergabung secara penuh. Mereka kemudian ditampung dalam TNI bagian masyarakat, sebagai pimpinan Ir. Sakirman yang juga duduk dalam pucuk pimpinan TNI. Pada tanggal 26 Oktober 1947 TNI bagian masyarakat mengadakan konferensi. Wakil Perdana Menteri Setiadjit yang sealian dengan Amir Syarifudin menegaskan bahwa TNI bagian masyarakat dalam usaha mempersatukan tenaga dalam pertahanan serta memberikan pendidikan ideologi kepada tentara. Struktur organisasi Pucuk Pimpinan TNI yang bersifat kolektif ini dimanfaatkan oleh kelompok Amir Syarifudin. Amir Syarifudin

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berhasil menghimpun kembali kekuatan di bawah naungan nama TNI, dengan konsepsi dan garis politik yang tetap.

Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat menuduh bahwa pembentukan TNI bagian masyarakat terlalu politik tidak sesuai dengan konsepsi pertahanan rakyat semesta. Menteri Pertahanan Amir Syarifudin dan Menteri Muda Pertahanan Aruji Kartawinata menyatakan adanya TNI bagian Masyarakat dan Pepolit merupakan konsekuensi prinsip-prinsip pertahanan bahwa tentara harus mengenal politik, agar mereka sadar membela politik, jika suatu saat pertentangan politik memuncak menjadi perang. Selain membentuk Pepolit Amir Syarifudin membentuk juga Biro Perjuangan yang dipimpin oleh orang berhaluan komunis Jokosuryono. Amir Syarifudin juga membentuk TNI tandingan, di samping itu Amir juga mengumpulkan bekas anggota Marine Keamanan Rakyat (MKR). Sebagai pimpinan Atmaji ke dalam direktorat Jenderal Angkatan Laut. Dengan demikian direktorat Jenderal tetap membawahi kekuatan "Tentara Laut Republik Indonesia" yang berhaluan komunis.

Usaha-usaha kaum komunis untuk menguasai dan menempatkan TNI dalam kekuasaan mereka dalam Perang Kemerdekaan digagalkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Kepala Stafnya, Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo. Namun kemudian komunis mengubah taktik dalam menguasai TNI melalui jalur Parleментар. Desember 1947 Z. Baharudin anggota Komite Nasional Indonesia Pusat kawan separtai Amir Syarifudin, menyampaikan kepada pemerintah mosi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Rasionalisasi Angkatan Perang yang berisi :

1. Rasionalisasi dalam kesatuan Angkatan Perang (dalam komando dan pimpinan Angkatan Perang).
2. Menteri Pertahanan bertanggung jawab penuh dalam masalah Angkatan Perang, baik dalam hal organisasi militer maupun siasat militer.

Tujuan sebenarnya adalah menguasai Angkatan Perang yang sudah lama diidam-idamkan oleh kaum Komunis (Nugroho Notosusanto, 1985 : 13).

Gagasan Rasionalisasi kemudian diambil alih Kabinet Hatta namun untuk membersihkan tubuh Angkatan Perang dari pengaruh komunis. Amir Syarifudin kemudian menghimpun kekuatan yang terkena rasionalisasi ke dalam FDR. FDR bersama kesatuan yang dipengaruhi PKI menjadi tulang punggung utama pemberontakan PKI Madiun tanggal 18 September 1948.

Usaha PKI untuk menguasai TNI tetap dilanjutkan terlebih setelah PKI menyusun strategi yang disebut Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTB). Sasaran PKI ialah mendekati prajurit-prajurit TNI agar berpihak kepada PKI. Kecemburuan PKI terhadap TNI semakin tajam terlebih setelah pemerintah menasionalisasi semua perusahaan milik Belanda, dimana PKI tidak dilibatkan dalam proses nasionalisasi perusahaan bahkan TNI mengawasinya secara ketat, sebab TNI sudah mengetahui siasat PKI.

Untuk menjaga perimbangan kekuatan Presiden melakukan reorganisasi dan integrasi dalam tubuh ABRI. ABRI ditetap-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kan dibawah Presiden/Pangti yang dibantu Kasad dan para panglima angkatan. Sehingga tiap angkatan berlomba untuk menjadi yang paling "Revolusioner" guna mendapat simpati dari Presiden Soekarno. Susunan seperti ini dijadikan alat PKI mengadu domba antar angkatan. Reorganisasi yang dipaksakan oleh Presiden terhadap ABRI ternyata berakibat negatif, dalam tubuh angkatan Laut lahir Gerakan Perwira Progresif Revolusioner yang mendapat pengaruh PKI. Kekaucauan inilah membuat PKI merasa diuntungkan.

PKI menganggap lawan utamanya adalah TNI-AD, pimpinan TNI-Aangkatan Darat pun menyadarinya maka TNI-AD tidak mengendorkan kewaspadaan dan tidak ragu-ragu menghadapi PKI seperti yang dikatakan oleh Mayjen Suprpto "TNI-AD tidak ragu-ragu menumpas golongan yang mau mendegradasikan ABRI sebagai alat pemerintah saja dan secara positif menyerukan kompetisi. ABRI tidak kenal istilah kiri atau kanan dan tidak kenal isme apapun kecuali ideologi negara" (Nugroho Notosusanto, 1985 : 17).

Bulan Mei 1965 PKI melakukan ofensif revolusioner, di PPN Karet IX Bandar Betsy anggota BTI mengeroyok Pelda Sudjono, hal ini secara sengaja PKI menantang TNI-AD, tantangan ini dijawab oleh Jenderal A. Yani, dengan menuntut para pelaku pengeroyokan. Sementara itu PKI melancarkan nasakomisasi di dalam tubuh ABRI khususnya TNI-AD. Menko/Hankam Jenderal Nasution menolak isue Nasakomisasi tersebut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sarana lain yang digunakan PKI untuk melakukan ofensif politiknya ialah media massa yang berhasil mereka kuasai. Dengan sekuat tenaga TNI-AD berusaha mencegah berkembangnya pengaruh PKI, terlebih yang menyangkut masalah pertahanan dan keamanan. Kekalahan PKI dalam pemberontakan 18 September 1948, dikarenakan PKI tidak mempunyai pasukan. Maka Aidit mencari cara agar Pemuda Rakyat, SOBSI, BTI dan Gerwani untuk mempunyai kekuatan bersenjata, cita-cita ini tercapai dengan kebutuhan TRIKORA dan DWIKORA. Cita-cita PKI ini disampaikan kepada Presiden Soekarno, mengenai mempersenjatai buruh tani yang kemudian menjadi gagasan Angkatan ke V.

Gagasan ini diimbangi Kasad Jenderal A.H. Nasution, dengan membentuk Hansip, Resimen Mahasiswa dan kesatuan karyawan, namun gagasan PKI yang dipimpin Aidit lebih mendapat perhatian dari Presiden Soekarno. Namun para panglima angkatan menolak, kecuali Pangau Omar Dani, sebab sangat berbahaya jika buruh dan tani dipersenjatai, mengingat perjuangan PKI menebus kekalahan pada peristiwa Madiun.

Secara diam-diam dengan bantuan oknum ABRI, PKI tetap melaksanakan keinginannya (Nugroho Nctosusanto, 1993 : 375). Pada tanggal 23 Mei 1965 D.N. Aidit dalam pidato HUT PKI menyatakan bahwa PKI merupakan Partai Komunis No I di luar kubu sosialis dan No 3 di dunia, hal ini dijadikan titik tolak PKI untuk terus mengembangkan situasi revolusioner sampai tujuan akhir PKI tercapai yaitu menggantikan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ideologi Pancasila menjadi ideologi Komunis. Apa yang dilakukan dan direncanakan PKI selalu mendapat tantangan yang kuat dari TNI Angkatan Darat. Rencana PKI selalu digagalkan. Bagi PKI, TNI-Angkatan Darat adalah penghalang utama maka harus disingkirkan.

D. Perebutan Kekuasaan Negara

Sikap pimpinan TNI Angkatan Darat yang secara tegas menindak ofensif revolusioner PKI, dinilai oleh pimpinan PKI sebagai penghalang. Maka PKI berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkan penghalang ini, cara-cara PKI adalah menyudutkan pimpinan TNI Angkatan Darat dengan melontarkan isue yang tidak benar misalnya pimpinan TNI Angkatan Darat tidak anti imperialis, tidak anti tuan tanah dan anti Nasakom.

Ketua CCPKI Aidit dalam rangka melaksanakan tugasnya mewujudkan metode ketiga dari Metode Kombinasi Tiga Bentuk (MKTB) telah menunjuk kader-kader PKI yang terpilih untuk melaksanakan pembinaan terhadap anggota-anggota ABRI yang sudah mendapat pembinaan PKI. Kader-kader ini terkenal dengan sebutan Biro Khusus yang merupakan organisasi yang sangat rahasia.

Biro khusus ini mengkoordinasi Biro Khusus Daerah, tujuannya saling tukar menukar informasi. Dalam kesatuan tersebut ditempatkan unsur-unsur ABRI.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tugas Biro Khusus :

1. Mengembangkan pengaruh dan ideologi PKI dalam tubuh ABRI.
2. Setiap anggota ABRI yang telah menjadi anggota PKI dapat membina anggota ABRI lainnya.
3. Mencatat anggota ABRI yang telah menjadi pengikut PKI agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan.

Biro Khusus Central dipimpin oleh Syam Kamarusaman, sebagai kepala dan orang pertama yang langsung bertanggung jawab kepada Ketua CCPKI D.N. Aidit. Syam dibantu oleh Pono yang menjadi Wakil Kepala I dan Bono Wakil Kepala II. Selanjutnya ketiganya bertindak sebagai pimpinan kolektif Biro Khusus Central PKI.

Untuk mencapai tujuan Biro Khusus secara aktif melakukan penyusupan ke dalam TNI-AD yang menduduki jabatan penting antara lain Mayjen TNI Pranoto Reksosamodra, Brigjen TNI Soepardjo, Kolonel Inf A. Latief dan Letkol Inf Untung. Sedang ke dalam TNI Angkatan Laut PKI berhasil menarik mayor KKO Pramuko Sudarmo yang aktif membantu PKI. Dalam TNI Angkatan Udara PKI berhasil membina Letkol Heru Atmojo dan Mayor Udara Sujono. Keberhasilan pembinaan dalam tubuh TNI Angkatan Udara, karena sikap Pangau Laks-dya Udara Omar Dhani (Moerdiono, 1994:47).

PKI juga menyusup ke dalam kabinet kerja IV, tokoh CCPKI Nyoto diangkat menjadi Menteri Negara dengan tugas membantu Presiden Soekarno dan Soebandrio. Nyoto berhasil dipercaya Presiden untuk menyusun teks pidato Presiden

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Soekarno tanggal 17 Agustus 1965 (Moerdiono, 1994 : 44).

Untuk menghancurkan TNI Angkatan Darat PKI menyebarkan isue bahwa di kalangan TNI Angkatan Darat terdapat Dewan Jenderal yang bertujuan menilai kebijakan politik Presiden Soekarno. Isue "Dewan Jenderal" ini sudah berbulan-bulan beredar sebelum meletusnya G 30 S / PKI. PKI katanya mengetahui kalau Angkatan Darat sudah siap menghadangnya dengan makin buruknya kesehatan Presiden Soekarno.

Oleh karena itu PKI semakin giat bekerja di kalangan Angkatan Darat dan Aidit sangat bangga bahwa Angkatan Darat banyak yang mendukungnya ini dibuktikan pada hasil pemilihan umum 1955 pencoblos tanda gambar palu arit dalam lingkungan Angkatan Darat tercatat 25%, sedang di asrama CPM Guntur, Jakarta banyak pemilih Palu Arit (Manai Sophiaan, 1994 : 75).

Karena rencana penghancuran PKI, menurut PKI dirumuskan oleh kelompok Jenderal Angkatan Darat, maka kelompok inilah yang didesas-desuskan sebagai "Dewan Jenderal". Kelompok Jenderal ini menurut PKI yang selalu merumuskan sikap politik Angkatan Darat dan wakil mereka yang duduk dalam Lembaga Negara. Mereka menduga dewan ini dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution dan Jenderal A. Yani.

Lebih jauh didesas-desuskan Dewan Jenderal bertujuan mengadakan kudeta sekitar hari ABRI tahun 1965. Isue-isue ini dibuat dalam sidang-sidang Polit biro CCPKI yang langsung dipimpin oleh D.N. Aidit. Sebagai tandingan "Dewan Jenderal" PKI menciptakan apa yang disebut "Per-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

wira-perwira yang berpikiran maju" yang tetap mempertahankan dan membela politik kiri Republik Indonesia. Perwira-perwira yang berpikiran maju inilah yang nanti akan bertindak mendahului kudeta "Dewan Jenderal".

Aidit memperkenalkan teori tentang kemungkinan Coup d'etat menjadi revolusi, sikap Aidit yang selama ini tampak loyal kepada Pemerintah Presiden Soekarno, tiba-tiba berubah. Aidit menyampaikan kritikan-kritikan terhadap kebijaksanaan Pemerintah dan Presiden Soekarno. Latihan-latihan kemiliteran khusus bagi kader PKI tingkat pusat didaerah Jakarta Raya diadakan di Lubang Buaya dan tugas itu diserahkan kepada Nyoto (Moerdiono, 1994:67).

Menjelang akhir bulan September 1965, persiapan pemberontakan hampir selesai. PKI semakin gencar menyudutkan TNI-Angkatan Darat dengan istilah Kapitalis Birokrat (Kabir). Dalam kesempatan lain DN Aidit menyatakan bahwa TNI-Angkatan Darat dinasti kapitalis birokrat yang melindungi para tuan tanah dan menghasut alat-alat negara supaya memusuhi kaum tani.

Biro khusus yang menjalin kerjasama dengan apa yang disebut "Kelompok Perwira Muda yang Maju" sepakat melaksanakan putusan Dewan Harian Politbiro, mendahului mengadakan gerakan memukul Angkatan Darat sebelum PKI dihancurkan.

Gerakan finalnya diputuskan dalam rapat Dewan Harian Politbiro pada tanggal 28 September 1965, sidang dihadiri 4 sekretaris CDB yang kebetulan ada di Jakarta yaitu CDB

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Barat. Anggota Politbiro yang hadir adalah Aidit, Lukman, Nyoto, Munir, Ruslan Wijayasastra dan Rewang.

Dalam rapat Politbiro ini semula ada yang meragukan gerakan efektif yang mendahului Angkatan Darat. Namun keraguan dapat ditepis oleh D.N Aidit kemudian memanggil anggota-anggota CC PKI yang ada di Jakarta, untuk mendukung sikap golongan, "Perwira Muda yang Maju" menentang kudeta yang dilakukan segolongan Jenderal (manai Sophiaan, 1994 : 77). Pimpinan partai menugaskan kepada anggota CC PKI untuk pergi ke daerah-daerah membantu CDB-CDB menjelaskan situasi politik dalam negeri dan sikap politik pimpinan partai dalam menghadapi situasi.

Akhirnya PKI melancarkan pemberontakan yang dikenal dengan nama Gerakan Tigapuluh September (G 30 S / PKI). PKI menculik dan membunuh para Jenderal, mereka itu ialah Letjen Ahmad Yani, Mayjen Soeprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen S Parman, Brigjen P.I Panjaitan, Brigjen Soetoyo dan Lettu Tendean, kemudian dibawa ke Lubang Buaya. Jenderal AH Nasution dapat meloloskan diri namun putrinya Ade Irma Suryani di tembak gerombolan G 30 S / PKI.

Langkah-langkah untuk mengadakan pemberontakan sebenarnya sudah dimulai PKI beberapa tahun. Persiapan intensif telah mereka lakukan dibawah perlindungan Presiden Soekarno. Aidit kemudian membuat analisa tentang sakitnya Presiden Soekarno dengan membuat issue "Dewan Jenderal". Analisa Aidit yang dibuat tanggal 28 Agustus 1965 disetu-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

juj oleh Politbiro CC PKI dan Dewan Harian CC PKI yang menghasilkan keputusan-keputusan ternyata gagal total. Keputusan tersebut antara lain :

- a. Mendahului "Dewan Jenderal" karena imbalan kekuatan militer menguntungkan PKI.
 - 1) Angkatan Darat tidak kompak adanya pertentangan antara Jendral Nasution dengan Jendral Ahmad Yani.
 - 2) Adanya perwira yang berpikiran maju.
- b. Membentuk Dewan Revolusi yang akan menggantikan Kabinet.
- c. Menentukan pembagian kerja.
 - 1) Soal militer di serahkan Aidit.
 - 2) Soal politik di serahkan Aidit, M.N Lukman dan Nyoto (Nugroho Notosusanto, 1985 : 26)

Meskipun Aidit mengemukakan dengan lantang betapa kuatnya PKI pada tahun 1965, ternyata percobaan Coup sama saja mengalami kegagalan seperti pada tahun 1948. TNI Angkatan Darat yang anti komunis semula dipojokkan oleh PKI mendapat kesempatan untuk mengambil tindakan balasan. Menyadari adanya kekosongan pimpinan Angkatan Darat, waktu itu Mayjen Soeharto sebagai Pangkostrad mengambil sikap balasan.

Gerakan 30 September 1965 yang didalangi PKI mengalami kegagalan hal ini dikarenakan :

- (a) Perhitungan waktu yang salah terlalu awal.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- (b) Terlalu percaya akan kekuatan sendiri dan meremehkan kekuatan lain.
- (c) Kesatuan komando baik politik maupun militer tidak ada.
- (d) Keraguan banyak perwira yang memilih antara setia kepada PKI atau kepada Presiden Soekarno.
- (e) Pasukan cadangan PKI tak bergerak.
- (f) Bebasnya Jendral A.H Nasution menimbulkan kegelisahan dikalangan Gestapu.
- (g) Sikap golongan non komunis yang serentak tidak membenarkan kekejaman PKI (Moedjanto, 1989 : 143).

Demikianlah akhir kesombongan PKI yang terlalu percaya akan kekuatan sendiri sehingga meremehkan kekuatan lain, akhirnya harus menguburkan jauh-jauh cita-cita yang telah bertahun-tahun dipersiapkan yaitu menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi Komunis.

Sejarah tak akan jujur selama pelakunya masih hidup apalagi sejarah itu untuk penguasa. Demikian pula sejarah tentang G 30 S/PKI yang merupakan tragedi Nasional diawali oleh tewasnya enam Jendral dan satu perwira pertama. Cara pemerintah yang berlebihan dalam menjelaskan peristiwa itu malahan mengundang curiga bahwa yang sedikit berbeda dengan versi pemerintah, tanggapan dari pemerintah kelewat reaktif.

Setelah presiden Soeharto tumbang dari kekuasaannya ada peluang untuk menggambarkan kembali peristiwa itu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

secara jernih. Namun untuk menjelaskan bagaimana kejadian yang sebenarnya itu terjadi masih juga membingungkan. Sebab dalam pemerintahan reformasi muncul berbagai tanggapan mengenai siapa sebenarnya yang mendalangi G 30 S/PKI juga masih teka-teki. Versi tersebut antara lain PKI pelaku satu-satunya, Soekarno mendalangi PKI, CIA menunggangi Angkatan Darat (Adil, 29 September 1998).

Selain itu dari para purnawirawan TNI AU juga akan meluruskan sejarah peristiwa G 30 S/PKI yang ditertibkan oleh sekretaris Negara. Niatan Perhimpunan purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia berniat memaparkan fakta sejarah secara lebih lengkap demi terciptanya citra TNI AU yang lebih baik, serta merehabilitasi sejumlah nama Pangti TNI AU. Diantara yang sudah direhabilitasi bahwa Omar Dhani selaku mentri/panglima AU yang dulu terlibat dalam G 30 S/PKI dinyatakan bukan komunis oleh pemerintah (Kompas, 15 Oktober 1998). Gerakan reformasi menjadi semakin lengkap dengan penuturan dan kisah sejarah sesuai apa yang terjadi bukan seperti yang dibuat gelap atau diselewengkan oleh penguasa. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai masalah-masalah yang menyebabkan Letjen Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV

PERGANTIAN PEMERINTAHAN RI 1966

A. Aksi Tritura

Pada waktu TNI-Angkatan Darat berhasil menggagalkan usaha perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965, berbagai golongan dalam masyarakat mengeluarkan pernyataan yang berisi tuntutan agar PKI dibubarkan. Semula tuntutan itu masih terbatas sifatnya yakni hanya ditujukan kepada PKI yang mendalangi pemberontakan. Tujuannya adalah keinginan rakyat untuk melenyapkan kekuatan yang bertentangan dan bahkan telah mengkhianati Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Di dalamnya terkandung keinginan untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekwen.

Dalam upaya untuk menegakkan kembali kemurnian Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, maka pada tanggal 14 Mei 1966 beberapa partai politik dan organisasi massa menandatangani piagam pembentukan front Pancasila, yang akan dijadikan wadah persatuan dan kesatuan rakyat pendukung Pancasila dan UUD 1945. Adapun orpol dan ormas yang tergabung dalam front Pancasila adalah NU, PSII, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, Perti, Muhammadiyah bersama kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Front Pancasila ini muncul sebagai pendukung Orde Baru dan memelopori tuntutan yang lebih luasa dengan Pancasila dan UUD 1945 (Nugro-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ho Notosusanto, 1985 : 27).

Pada mulanya tuntutan yang dilancarkan oleh berbagai golongan masih bernada lunak, kemudian mereka salurkan lewat demonstrasi yang dimotori oleh Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Pada waktu terjadinya pemberontakan PKI meletus, keadaan ekonomi Indonesia kacau balau, karena politik mercu suar dan adanya konfrontasi menggayang Malaysia. Pemerintah tidak dapat berfungsi secara efisien. Usaha menaikkan daya beli rupiah pada akhir tahun 1965 dengan mengadakan kurs baru (devaluasi) atas rupiah, perbandingan 1:1000 tidak menolong keadaan (Moedjanto, 1989 : 145).

Keputusan ini disusul dengan ketetapan Presiden No 27 yang diikuti dengan ketetapan-ketetapan tambahan tentang kenaikan tarif dan jasa, karena pengaruh devaluasi rupiah. Ketegangan semakin meningkat tatkala Pemerintah menaikkan harga minyak bumi dan bahan bakar pada tanggal 3 Januari 1966 yang akibatnya dirasakan rakyat. Kesabaran rakyat ada batasnya dengan semakin parahnya krisis ekonomi dan kesejahteraan rakyat semakin merosot tajam. Hal ini membuat semakin meningkatnya tuntutan rakyat. Aksi-aksi menyampaikan tuntutan rakyat tersusun dalam slogan populer Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) yaitu:

1. Bubarkan PKI
2. Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI.
3. Turunkan harga-harga barang.

Menyadari gawatnya ekonomi, pemerintah membentuk dua panitia adhoc yang tugasnya menyelidiki secara menyeluruh

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengaruh kenaikan harga dan tarif dari barang-barang dan jasa. Hasil ini dipakai untuk meneliti inflasi.

Disamping itu pemerintah juga membentuk suatu panitia yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai pejabat pemerintah dan pemimpin partai politik yang tugasnya menghimpun fakta-fakta dan keterangan. Hasilnya disimpulkan bahwa tuntutan keras dari rakyat agar Presiden / Pemimpin Besar Revolusi segera menyelesaikan situasi politik yang semakin memanas.

Kebijaksanaan pimpinan negara dalam memecahkan berbagai kemelut dalam negeri dipandang oleh rakyat sebagai suatu kebijaksanaan yang tak sesuai gejolak yang muncul didalam masyarakat, tanggapan dari Pemerintah, kemudian tuntutan masyarakat semakin meningkat.

Hari-hari pertama tahun baru 1966 dilewati dengan semakin tinggi suhu politik, karena aksi demi aksi Front Pancasila dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia makin meningkat. Aksi-aksi ini guna memperjuangkan tuntutan rakyat bukan tuntutan Mahasiswa yang tergabung dalam kesatuan aksi hanya sebagian kecil. Padahal tuntutan untuk membubarkan PKI, datang dari seluruh lapisan masyarakat dan Angkatan Bersenjata, maka topik pernyataan mahasiswa Indonesia adalah "Tri Tuntutan Rakyat". Ini juga untuk membuktikan bahwa perjuangan mahasiswa itu demi membawa suara hati nurani rakyat Indonesia (Abdul Gafur, 1987:430)

Lahirnya Tritura memang merupakan hasil suatu proses sejak G 30 S / PKI melakukan perebutan kekuasaan. Melihat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

hubungan itu maka Tritura adalah konsep operasional untuk mendukung strategi lenyapnya Komunis di negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila. Tritura adalah sarana operasional dari kekuatan Pancasila yang sudah sejak lama menentang eksistensi Komunis di Indonesia.

Aksi demonstrasi para mahasiswa didukung oleh Front Pancasila dan massa rakyat. Jaket Kuning Universitas Indonesia dijadikan sebagai lambang penegak keadilan dan kebenaran yang murni. Presiden menanggapi aksi mahasiswa dengan mengundang wakil mahasiswa guna mengikuti sidang paripurna kabinet Dwikora pada tanggal 15 Januari 1966 di Bogor. Disini para mahasiswa dituduh, bahwa aksi mahasiswa yang didalangi oleh Nekolim (Neo-Kolonialisme, Kolonialisme dan Imperialisme) khususnya oleh CIA (Central Intelligence Agency) Amerika Serikat. Untuk mempertahankan kedudukannya Presiden Soekarno membentuk "Barisan Presiden" (Nugroho Notosusanto, 1993 : 407).

Dr. Soebandrio terdesak oleh aksi Tritura memanfaatkan Barisan Soekarno demi kepentingan politik, yang tujuannya untuk mempertahankan Legalitas PKI. Tanggal 16 Januari 1966 ada isue bahwa Barisan Soekarno bertujuan untuk mempertahankan ajaran pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Karena rakyat masih mendukung komando Presiden guna mempertinggi kewaspadaan terhadap Nekolim kontra revolusi, Gestok / PKI.

ABRI tetap waspada dalam menghadapi isue-isue dengan menyatakan bahwa ABRI tetap taat kepada pemimpin Besar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Revolusi / Panglima Tertinggi ABRI dan memelihara kekompakan sesama ABRI dan kekompakan dengan rakyat. Pimpinan Angkatan Darat menyatakan seluruh rakyat adalah Barisan Soekarno maka tidak perlu lagi pembentukan barisan Soekarno secara fisik.

Pembentukan Barisan Soekarno tidak lain adalah suatu usaha untuk membelokkan perhatian masyarakat dalam rangka penyelesaian politik terhadap pemberontakan G 30 S / PKI. Tanggal 20 Januari 1966 Presiden Soekarno kembali menyerukan kepada seluruh rakyat untuk menyusun barisan pembela Pemimpin Besar Revolusi. Namun masyarakat tetap tidak dapat ditenangkan.

Malahan dari pihak massa PNI/Front Marhaenis Ali Surachman (PNI-ASU) membuat aksi tandingan untuk membebaskan aksi-aksi KAMI, yang dibantu Resimen Tjakrabirawa dan Badan Pusat Intelijen (BPI). Dengan dukungan Front Pancasila dan ABRI perjuangan Tritura dapat diteruskan. Pada tanggal 14 Februari 1966 Front Pancasila mengeluarkan pernyataan pokok yang mendukung tuntutan Tritura dan menolak segala bentuk fitnah yang ditujukan kepada KAMI dan front Pancasila.

Dengan alasan meningkatkan perjuangan revolusi, Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1966 melakukan perombakan Kabinet Dwikora yang kemudian terkenal dengan Kabinet Dwikora yang disempurnakan atau Kabinet Gestapu. Kabinet Dwikora ini ternyata memperbesar kekecewaan Mahasiswa terhadap Presiden Soekarno karena :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Jenderal Nasution yang anti Komunis begitu dihormati dan telah mengorbankan diri dan anaknya terbunuh disingkirkan dari Kabinet.
2. Beberapa orang yang ada indikasi PKI dimasukkan dalam kabinet, antara lain Sumarjo sebagai Menteri P dan K, serta Letkol Syafei sebagai Menteri Negara (Moedjanto, 1989 : 146).

Pada hari pelantikan "Kabinet Dwikora yang disempurnakan" demonstrasi meledak di seluruh kota Jakarta dan menjalar sampai ke depan Istana Merdeka. Jalan-jalan dipenuhi oleh para demonstran dengan aksi pengempasan ban-ban kendaraan yang lewat, yang berakibat macetnya lalulintas di sebagian besar ibu kota. Salah satu mahasiswa Universitas Indonesia Arief Rahman Hakim, tewas tertembak pada waktu itu. Gugurnya mahasiswa Arief Rahman Hakim menjadikan situasi semakin panas dan gerakan massa yang dipelopori para mahasiswa semakin menghebat.

Tindakan KAMI ternyata menimbulkan kemarahan besar pada diri Presiden. Pada tanggal 25 Februari 1966 bukan PKI yang dibubarkan tetapi justru KAMI sendiri. Pembubaran berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia (Kogam). Keputusan ini dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan "Ikhar Keadilan dan Kebenaran" yang memprotes pembubaran KAMI dan mengajak rakyat meneruskan perjuangan.

Sementara itu Dr. Soebandrio menyebarkan perintah penangkapan terhadap tokoh-tokoh KAMI dengan menghasut

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

massa Marhaen untuk melakukan aksi teror terhadap lawan politiknya. Ini membuat situasi semakin panas dan tidak aman. Setelah KAMI dibubarkan muncul Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia melanjutkan aksi KAMI, krisis nasional semakin tidak terkendali. Para mahasiswa kemudian membentuk Resimen Arief Rahman Hakim. front Pancasila meminta kepada Presiden Soekarno agar pembubaran KAMI ditinjau kembali.

Dalam suasana demikian departemen Luar Negeri yang dipimpin oleh Dr. Soebandrio dirusak oleh para pelajar dan mahasiswa. Aksi demonstrasi tanggal 8 Maret 1966 menimbulkan kemarahan besar Presiden Soekarno. Hari itu juga Presiden mengeluarkan perintah hariannya yang ditujukan kepada seluruh ABRI, parpol-parpol dan ormas-ormas, serta seluruh rakyat "yang progresif revolusioner" supaya waspada terhadap segala usaha untuk membelokkan jalannya revolusi kita ke kanan dan supaya siap sedia untuk menghancurkan setiap usaha yang langsung maupun tidak langsung merongrong kepemimpinan, kewibawaan atau kebijaksanaan Presiden / Mandataris MPRS / Pangti ABRI / Pemimpin Besar Revolusi serta untuk memperhebat "pengganyangan terhadap Nekolim" serta proyek British Malaysia (Nugroho Notosusanto, 1993 : 410).

Tritura dipandang dari segi perjuangan bangsa bukanlah nilai baru. Tritura adalah kelanjutan dari nilai-nilai perjuangan 1945 yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tritura mengandung suatu semangat yang dilatarbelakangi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

peristiwa tahun 1966 maupun sebelumnya. Tritura pada dasarnya suatu tekad untuk mengakhiri deviasi-deviasi baik politik, ideologi maupun ekonomi yang terkoyak-koyak secara tajam. Tritura menandai bersatupadunya kembali bangsa Indonesia. Dengan kata lain Tritura dan gerakannya adalah aktualisasi wawasan kebangsaan Indonesia yang sudah terwujud sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Peristiwa itu digerakkan bukan oleh satu golongan atau angkatan tertentu saja, tetapi oleh banyak jajaran dan kelompok masyarakat yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

Mahasiswa-mahasiswa yang membentuk laskar Arief Rahman Hakim di bawah perlindungan Pangdam Jaya, Brigjen Amir Machmud kemudian menamakan diri Angkatan 66. Dalam semangat Tritura atau semangat 66 bergerak dari banyak unsur, namun tetap bangsa Indonesia. Jadi yang memberikan semangat lahirnya Tritura, dapat disebut sebagai semangat 66, adalah kekuatan kesadaran wawasan kebangsaan yang berarti Bhinneka Tunggal Ika.

Keinginan rakyat Indonesia yang tercetus dalam Tritura adalah cerminan untuk meluruskan kembali perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai jalan untuk membangun masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil makmur berdasarkan Pancasila. Pembubaran PKI mengandung tekad untuk membela dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pembubaran PKI mengandung tekad untuk membela, menegakkan dan melaksanakan Pancasila. Pancasila tidak mungkin dilaksanakan oleh PKI sebab ideologi PKI mengandung unsur yang bertolak belakang dengan Pancasila. Pembersihan Kabinet dari unsur-unsur PKI mengandung tekad untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pemerintah yang orientasinya tidak sepenuhnya kepada Pancasila tidak mungkin dapat membimbing rakyat dalam melaksanakan pembangunan dalam negara Pancasila. Penurunan harga atau perbaikan ekonomi mengandung tekad untuk membenahi segala kemerosotan ekonomi yang merajalela waktu itu. Sebab hanya dengan membenahan ekonomi akan dapat dilaksanakan pembangunan yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan amanat proklamasi yang harus dijalankan di bumi Indonesia yang merdeka.

B. Surat Perintah Sebelas Maret

Kacau balaunya pentas politik Indonesia dalam periode demokrasi liberal diliputi oleh pertikaian, dilanjutkan dalam demokrasi terpimpin dimana Presiden Soekarno tidak tunduk pada Undang - Undang Dasar 1945 dengan membuat konsep baru yang dikenal dengan Konsepsi Presiden. Tujuan membawa bangsanya kembali ke Undang - Undang Dasar 1945 adalah baik, namun langkah-langkah yang diambil hasilnya porak poranda bahkan malah petaka besar.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Melihat kenyataan diatas dimana Presiden Soekarno tidak mampu lagi membendung gejolak masyarakat yang terus mendesak Pemerintah untuk segera mengambil sikap dari situasi yang tidak menentu. Maka Tritura segera direalisasikan pihak Angkatan Darat dibawah pimpinan Letjen Soeharto, yang sejak 16 Oktober 1965 telah dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat. Semula Letjen Soeharto masih menghormati kewibawaan Presiden, namun nampaknya Presiden enggan mengutuk PKI, maka Angkatan Darat kemudian tertarik bekerja sama dengan KAMI dan KAPPI dalam menghadapi Presiden.

Untuk mengatasi krisis politik yang semakin memuncak Presiden Soekarno memanggil Front Pancasila, PNI-ASU dan Partindo pada tanggal 10 Maret 1966. Dalam pertemuan ini dihadiri pula wakil-wakil NU, PSII, IPKI, Perti, Partai Katolik, Parkindo dan Muhammadiyah, sedang Presiden Soekarno didampingi oleh para wakil Perdana Menteri (Waperdam) Dr. Subandrio, Chairul Saleh, Dr. J Leimena, menteri Dalam Negeri dr. Sumarmo, Menteri Penerangan Mayjen Achmad dan Duta Besar RI untuk Kuba A.M Hanafi (Nugroho Notosusanto, 1993 : 41).

Dalam pertemuan ini agar partai politik dan organisasi massa mengutuk aksi-aksi Tritura, namun ditolak oleh Front Pancasila. Front Pancasila mengingatkan agar Presiden mengutuk PKI dan membubarkannya, sebab PKI telah melakukan percobaan Coup d'etat. Kabinet Dwikora mengadakan sidang paripurna pada tanggal 11 Maret 1966 bertujuan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mencari jalan keluar dari krisis yang telah memuncak. Diluar sidang diboikot oleh para demonstran dengan melakukan pengempesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju Istana. Saat Presiden berpidato diberi tahu oleh Brigjen Sabur komandan Tjakrabirawa bahwa di luar Istana ada pasukan yang tidak dikenal. Presiden Soekarno kemudian meninggalkan sidang menuju Istana Bogor yang diikuti oleh Waperdam I Dr. Soebandrio dan Waperdam III Chairul Saleh. Sedang Waperdam II Dr. J. Leimena kemudian menutup sidang yang kemudian ikut menyusul ke Bogor. Sebenarnya pasukan yang tidak dikenal mengelilingi Istana bertugas untuk menangkap Dr. Soebandrio yang dianggap salah satu tokoh G 30 S / PKI. Dr. Soebandrio yang menjadi sasaran hendak ditangkap ikut dengan Bung Karno ke Istana Bogor sehingga usaha untuk menangkap Dr. Soebandrio gagal. Sesudah keluar Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR), Dr. Soebandrio baru ditangkap di Wisma Negara dalam komplek Istana Jakarta, dilakukan setelah Presiden Soekarno terlebih dulu disingkirkan oleh "Tjakarabirawa" di bawa ke Istana Bogor. Tjakrabirawa menolak penangkapan Dr. Soebandrio dilakukan selagi Presiden Soekarno berada di Istana Jakarta (Manai Sophiaan, 1994 : 227).

Kekacauan dalam sidang paripurna ini merupakan kesempatan bagi pimpinan TNI-Angkatan Darat untuk menawarkan jasa baiknya demi pemulihan keadaan, sehingga kemacetan roda pemerintahan dapat diakhiri. Tiga Jenderal diutus oleh pimpinan Angkatan Darat untuk menemui Presiden Soe-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

karno ke Istana Bogor ialah M. Yusuf, Amir Machmud dan Basuki Rachmat, untuk menyampaikan pesan dari Pimpinan Angkatan Darat, "Kalau Bung Karno masih percaya kepada saya, maka berikanlah perintah dan wewenang penuh untuk bisa menyelesaikan dan mengatasi keadaan ini". Ketiga Jenderal tersebut hari itu juga terus berangkat menuju Istana Bogor untuk menyampaikan pesan kepada Bung Karno. Sorenya sekitar jam 20.00 ketiga Jenderal telah membawa Surat Perintah yang ditandatangani oleh Bung Karno. Surat Perintah yang ditandatangani oleh Bung Karno kemudian populer dengan nama Supersemar (Surat Perintah 11 Maret). Isi pokoknya "Memerintahkan kepada Letjen Soeharto, untuk atas nama Presiden mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden".

Kejadian-kejadian yang mendahului keluarnya Supersemar dapat dituturkan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Maret 1966 berlangsung sidang Kabinet Dwikora di Istana Negara Jakarta yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Di tengah-tengah persidangan tersebut Presiden Soekarno menerima laporan dari ajudan Presiden Komando pasukan Pengawal Tjakrabirawa bahwa di sekitar Istana terdapat pasukan-pasukan yang tidak dikenal.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Menerima laporan tersebut Presiden Soekarno segera menyerahkan pimpinan sidang Kabinet kepada Waperdam II Dr. J. Leimena dan Presiden segera meninggalkan sidang dengan menggunakan pesawat helikopter yang telah diparkir, keluar dari Istana dan pergi ke Bogor, Waperdam I Dr. Soebandrio dan Waperdam III Chairul Saleh meyertai Presiden Soekarno.
3. Setelah sidang kabinet ditutup oleh Dr. Leimena tiga orang Perwira Tinggi ABRI yang menghadiri Sidang Kabinet tersebut yaitu : Mayor Jenderal Basuki Rachmat waktu itu Menteri Veteran, Brigadir Jenderal M. Yusuf waktu itu Menteri Perindustrian Dasar dan Brigadir Jenderal Amir Machmud waktu itu Pangdam V/Jaya langsung menghadap Menteri panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim yang pagi itu kebetulan tidak hadir dalam sidang Kabinet karena sakit.
4. Di samping melaporkan tentang keadaan Sidang Kabinet yang baru lalu, ketiga perwira tinggi tersebut juga meminta izin kepada Menteri/Pangad untuk menemui Presiden Soekarno di Bogor guna melaporkan situasi yang sebenarnya di Jakarta, yaitu bahwa tidak benar ada pasukan liar di sekitar Istana dan ABRI khususnya TNI-Angkatan Darat tetap setia dan taat kepada Presiden Soekarno.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Menteri/Pangad Letnan Jenderal Soeharto mengizinkan ketiga Perwira Tinggi tersebut pergi ke Bogor, disertai pesan untuk disampaikan kepada Presiden Soekarno bahwa Letnan Jenderal Soeharto sanggup mengatasi keadaan, apabila Bung Karno mempercayakan hal itu kepadanya.
6. Di Bogor ketiga Perwira Tinggi itu menghadap Presiden Soekarno yang didampingi oleh Dr. Soebandrio, Dr. Chairul Saleh dan Dr. J. Leimena yang telah menyusul ke Bogor, serta Ajudan Presiden Brigadir Jenderal M. Sabur.
7. Setelah mengadakan pembicaraan dan pembahasan yang cukup mendalam akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk memberikan Surat Perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto. Ditugaskanlah kepada yang hadir yaitu Dr. Soebandrio, Dr. Chairul Saleh, Dr. J. Leimena, ketiga perwira itu dan Brigadir Jenderal Sabur untuk merumuskan surat perintah tersebut.
8. Pada sore sekitar pukul 19.00 surat perintah tersebut sudah siap disusun dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Surat perintah tersebut dibawa langsung oleh ketiga Perwira Tinggi itu dan disampaikan pada malam hari itu juga kepada Letnan Jenderal Soeharto di Jakarta (Nugroho Notosusanto, 1985 : 90).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret Letnan Jenderal Soeharto atas nama Presiden menetapkan pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Keputusan pembubaran dan pelarangan PKI diambil oleh pengemban Supersemar berdasarkan pertimbangan bahwa PKI nyata-nyata melakukan perbuatan kejahatan dan kekejaman. Selain itu telah dua kali melakukan pengkhianatan terhadap negara dan rakyat Indonesia.

Seminggu kemudian diikuti tindakan penangkapan terhadap 15 orang menteri yang disangsikan itiked baiknya, menteri-menteri tersebut adalah :

1. Dr. Soebandrio, Wakil Perdana Menteri I, Menteri Luar Negeri.
2. Dr. Chairul Saleh, Wakil Perdana Menteri III, Ketua MPRS.
3. Ir. Setiadi Reksoprodjo, menteri Urusan Listrik dan Ketenagaan.
4. Sumardjo, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
5. Oei Tju tat, SH., Menteri Negara diperbantukan kepada Presidium Kabinet.
6. Ir. Surachman, Menteri Pengairan Rakyat dan Pembangunan Desa.
7. Jusuf Muda Dalam, Menteri Urusan Bank Sentral, Gubernur Bank Indonesia.
8. Armunanto, Menteri Pertambangan.
9. Sutomo Martopradopo, Menteri Perburuan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

10. A. Astrawinata, SH., Menteri Kehakiman.
11. Mayor Jenderal Achmadi, Menteri Penerangan dibawah Presidium Kabinet.
12. Drs. Moh. Achadi, Menteri Transmigrasi dan Koperasi.
13. Letnan Kolonel Imam Sjafei, Menteri Khusus Urusan Pengamanan.
14. J.K. Tumakaka, Menteri/Sekretaris Jenderal Front Nasional.
15. Mayor Jenderal Dr. Soemarno, menteri/Gubernur Jakarta raya (Nugroho Notosusanto, 1985 : 94).

Sebagai kelanjutan pengamanan terhadap kelima belas menteri tersebut tanggal 18 Maret 1966, pengemban Supersemar menunjuk beberapa menteri ad interim guna mengisi pos-pos yang kosong karena diamankan. Dengan tindakan-tindakan Jenderal Soeharto selaku pengemban Supersemar, semua rakyat terutama KAMI/KAPPI merasa puas karena dua tuntutan dari Tritura telah dilaksanakan. Banyaknya menteri yang ditangkap dan demi penghematan serta efisiensi kerja maka disusunlan kabinet baru yang disebut Kabinet Dwikora yang lebih disempurnakan lagi dengan tokoh utama, Jenderal Soeharto, Sultan Hamengku Buwono IX, dan Adam Malik.

Pada tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966 diadakan Sidang Umum V MPRS di Jakarta di bawah ketuanya, Jenderal Nasution.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Ketetapan-ketetapan yang penting ialah :

1. TAP No. IX / MPRS / 66 berisi pengukuhan Supersemar. Dengan demikian Presiden Soekarno tidak dapat mencabutnya.
2. TAP No. XXV / MPRS / 66 berisi pengukuhan atas pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme-komunis di Indonesia.
3. TAP No. XVIII/ MPRS/ 66 berisi pencabutan TAP No. III/ MPRS/ 63 yang berisi pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.

Maka MPRS menyelenggarakan Sidang Istimewa di Jakarta pada tanggal 7 sampai tanggal 12 Maret 1967. Dalam Sidang Istimewa MPRS dengan ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967 memutuskan untuk mencabut kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno. Dengan ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1967, MPRS mengangkat Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, Jendral Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dipilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilihan Umum. Pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto pengemban Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. Dengan Sidang Istimewa ini mengakhiri dualisme pemerintahan.

Pada tanggal 21-30 Maret 1968 MPRS mengadakan Sidang Umum V di Jakarta. Dalam Sidang Umum ini MPRS mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia, hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Pada

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tanggal 27 Maret 1968 dilakukan pelantikan Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia.

Pada masa reformasi ini Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kembali mencuat setelah di hembuskan oleh Wilardjito yang mengaku sebagai saksi mata dalam peristiwa sejarah ini yang mengejutkan. Dengan kesaksiannya bahwa dua jendral yakni Basuki Rachmat dan Maraden Panggabean menodongkan pistol kearah Bung Karno (Bernas, 25 Agustus 1998). Pernyataan Wilardjito ini serta merta menjadi perdebatan ramai antara yang pro dan kontra.

Maraden Panggabean sendiri segera membantah, karena menurutnya, ia tidak ikut ke Bogor (Bernas, 28 Agustus 1998). sementara Jendral M.Yusup yang menjadi pelaku sejarah juga membantah adanya penodongan. Mantan Pangkos-trad Letjen TNI (Purn) Kemal Idris mengaku bahwa ia diberi tugas Mentri Panglima Angkatan Darat Letnan Jendral Soeharto untuk menyerahkan pasukannya mengepung Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 11 Maret 1966 (Bernas, 30 Agustus 1966).

Para sejarahwan pun sejak awal memang meragukan Versi resmi Supersemar bahwa surat tersebut ditanda tangani secara sukarela atau paksaan. Para pakar sejarah menilai bahwa Supersemar sebetulnya pengalihan kekuasaan. Hal ini terbukti setelah Supersemar ditandatangani, Letjen Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. I/3/1966 tentang pembubaran PKI yang ditandatangani Letjen Soeharto atas

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

nama Presiden Soekarno. Keputusan Presiden itu ternyata di dasarkan pada surat Perintah yang dibuat tanggal 11 Maret 1966. Padahal Supersemar itu bukan mandat politik melainkan mandat militer. Sedangkan pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 bersifat politik (Bernas, 26 Agustus 1998).

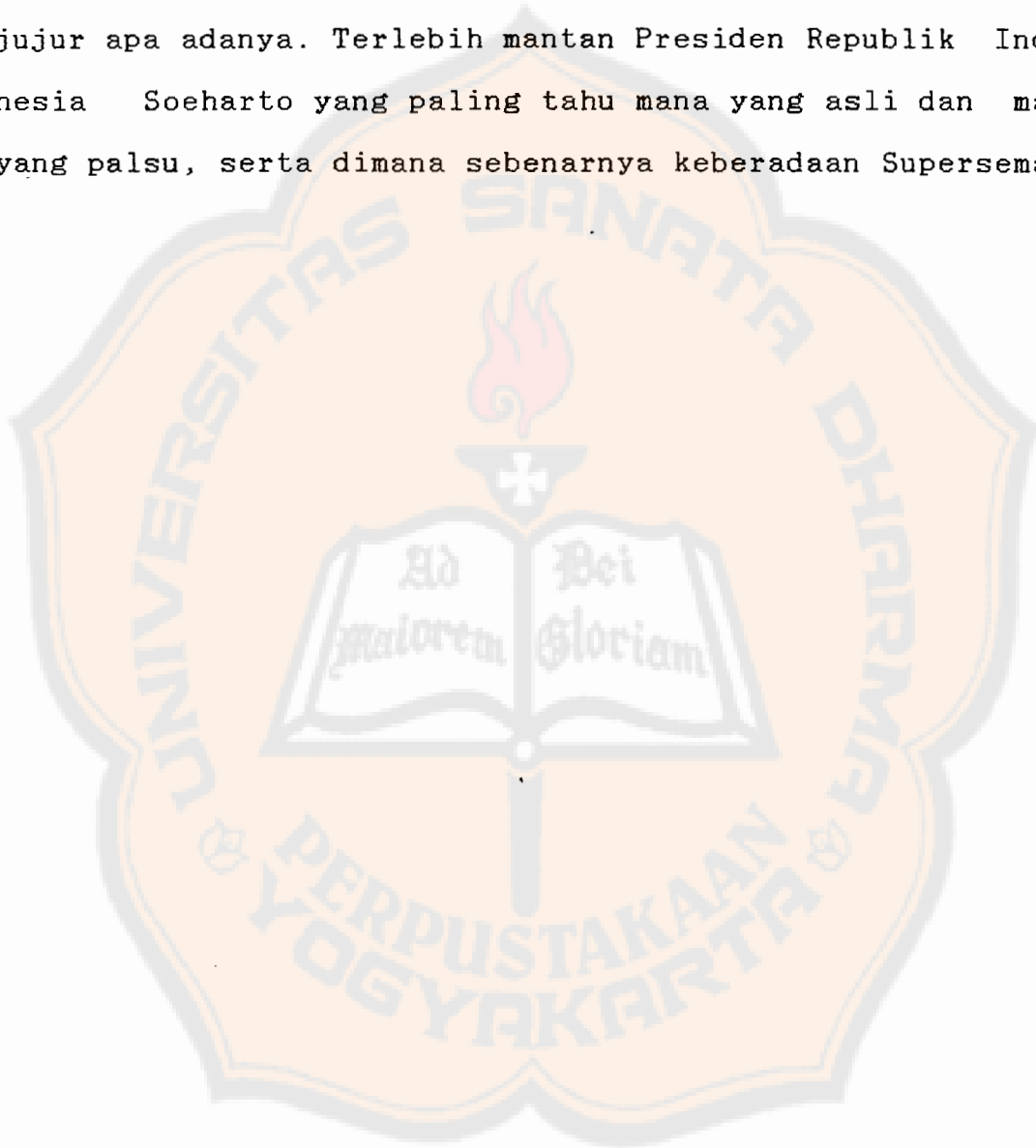
Pengakuan Subagio Anan mantan kepala Biro Penerangan di Departemen Koperasi semasa menteri M. Achmadi, bahwa tanggal 13 Maret 1966 Bung Karno membuat Surat Koreksi atas pelaksanaan Supersemar oleh pengemban Supersemar yakni Letjen TNI Menpangad Soeharto. Surat itu dibuat Bung Karno untuk mengoreksi "kekeliruan" yang dilaksanakan Soeharto sebagai pelaksana Supersemar karena membuat Kepres No. I/3/1966 pada tanggal 11 Maret 1966 (Bernas, 1 September 1998). Sebab ada anggapan Supersemar sebagai pelimpahan wewenang Presiden Soekarno selaku Mandataris MPRS kepada Jendral Soeharto yang sifatnya sementara. Setelah kondisi keamanan pulih surat perintah harus dikembalikan namun hal ini tidak dilakukan oleh Jendral Soeharto sebagai pemegang Supersemar.

Terlepas ada penodongan atau tidak hal ini menunjukkan bahwa Presiden Soekarno dalam menandatangani Surat Perintah dalam keadaan tertekan, terbukti adanya pasukan yang tidak diketahui identitasnya mengepung Istana.

Anehnya Surat bersejarah itu sampai sekarang tak diketahui keadaannya, bahkan sudah dinyatakan hilang, namun akhir-akhir ini muncul dua versi Supersemar (Bernas, 1 September 1998). Dengan munculnya versi Supersemar, maka

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ada dugaan Supersemar dipalsukan. Sehingga harus dicari mana Supersemar yang asli dan mana Supersemar yang palsu. Karena peristiwa ini peristiwa sejarah, maka semua pihak baik saksi maupun pelaku sejarah, seyogyanya berbicara jujur apa adanya. Terlebih mantan Presiden Republik Indonesia Soeharto yang paling tahu mana yang asli dan mana yang palsu, serta dimana sebenarnya keberadaan Supersemar.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V

KESIMPULAN

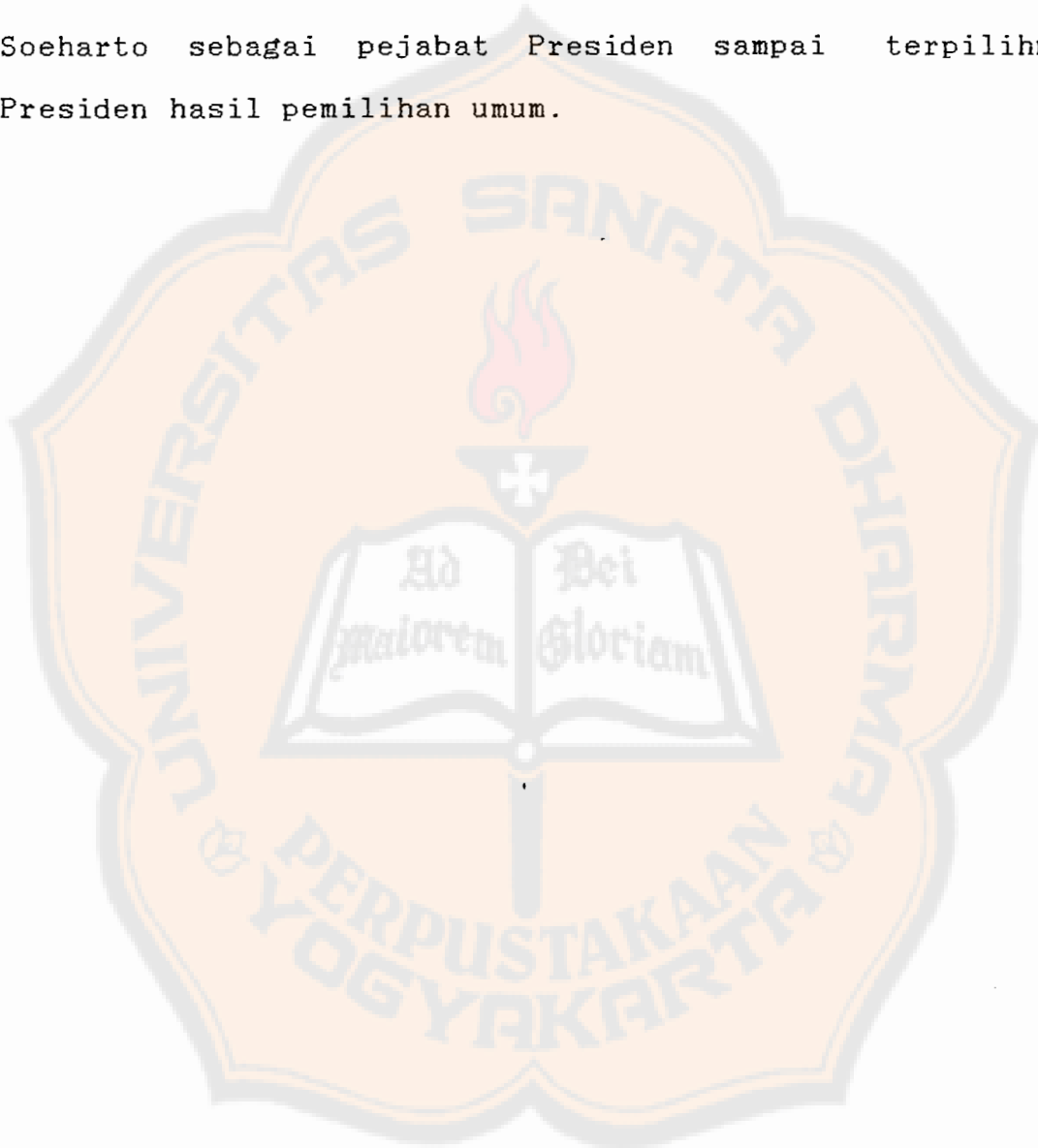
Pada masa demokrasi liberal Aidit, Alimin pulang kembali ke Indonesia dari pengasingannya di Moskow sejak pemberontakan PKI Madiun 18 September 1948 mengalami kegagalan. Dibawah pimpinan trio Aidit, Lukman dan Nyoto menghidupkan kembali PKI pada tanggal 14 Februari 1950, sehingga PKI berhasil menjadi partai nomor empat setelah PNI, Masyumi dan NU pada pemilihan Umum yang pertama pada tahun 1955. Memasuki tahun 1964 memberi kesempatan kepada PKI untuk memaksakan pengaruhnya dalam kehidupan nasional melalui konsep Nasakom yang memanfaatkan Presiden Soekarno dalam kepentingan politiknya.

Pemberontakan bersenjata yang dilancarkan oleh Gerakan 30 September merupakan puncak pelaksanaan dari strategi pengkhianatan PKI untuk merebut kekuasaan yang telah dipersiapkan sejak PKI hidup kembali. Sejak hidup kembali, PKI merumuskan strategi metode kombinasi tiga bentuk perjuangan. Gerak-gerik PKI tak pernah lepas dari pengamatan TNI-AD. Maka melalui Gerakan 30 September 1965 PKI berusaha melumpuhkan Pimpinan TNI-AD.

Situasi semakin tidak menentu, para mahasiswa menuntut kepada pemerintah yang mereka rumuskan dalam TRITURA. Mendapat desakan dari mahasiswa Presiden Soekarno semakin tidak berwibawa. Untuk mengatasi krisis kepercayaan kepada pemerintah, tampillah Angkatan Darat mengatasi situasi. Selanjutnya keluarlah Surat Perintah Sebelas Maret guna

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan situasi. Tidakan selanjutnya mengakhiri dualisme pemerintahan diadakan sidang Istimewa MPRS yang mencabut kekuasaan pemerintah Presiden Soekarno dan mengangkat Jendral Soeharto sebagai pejabat Presiden sampai terpilihnya Presiden hasil pemilihan umum.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gafur, Pak Harto Pandangan dan Harapannya, Jakarta: Pustaka Kartini, 1987.
- Dwipoyono, G., Jejak Langkah Pak Harto, Jakarta: P.T Asri Media Pustaka, 1990.
- Imran Hasibuan, Bayang - bayang PKI, Jakarta: P.T. Intermasa, 1996.
- Jajak, M.D., Biografi Presiden dan Wakil Presiden, Jakarta: P.T Asri Media Pustaka, 1990.
- Kuntawijaya, Ilmu Sejarah, Yogyakarta : Bentang Budaya, 1995.
- Lukman Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.
- Manai Sophiaan, Kehormatan Bagi yang Berhak, Jakarta : Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 1994.
- Marshal Green, Dari Soekarno ke Soeharto, Jakarta : P.T. Temprint, 1993.
- Marwati Djonet Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia V, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1993.
-, Sejarah Nasional Indonesia VI Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1993.
- Moedjanto, G., Indonesia Abad ke-20 1, Yogyakarta : Kanisius, 1989.
-, Indonesia Abad ke-20 2, Yogyakarta : Kanisius, 1989.
- Moerdiono, Gerakan 30 September Pemberontakan PKI, Jakarta : P.T. Ghalia Indonesia, 1994.
- Nawawi Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : Gama University Press, 1987.
- Nugroho Notosusanto, 30 Tahun Indonesia Merdeka 2, Jakarta : P.T. Citra Lamtoro Gung Persada, 1988.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Nugroho Notosusanto, 30 Tahun Indonesia Merdeka 3,
Jakarta : P.T. Citra Lamtoro Gung Persada,
1988.
-, Konsensus Nasional 1966-1969,
Jakarta : P.N. Balai Pustaka , 1985
- Pringgodigdo, A.K., Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia,
Jakarta : P.T. Pustaka Rakyat, 1970.
- Roeder, O.G., Anak Desa Biografi Presiden Soeharto,
Jakarta : Gunung Agung, 1969.
- Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metode
Sejarah, Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka
Utama, 1992.
- Slamet Mulyono, Kesadaran Nasional, Jakarta :
Inti Idayu Press, 1996.
- Suharsini Arikunta, Prosedur Penelitian, Jakarta :
P.T. Roneka Cipta, 1996.
- Bernas, 25 Agustus - 5 September 1998.
- Kompas, 14 - 15 Oktober 1998.